

**ANALISIS PERAN DAN KETERLIBATAN KOMITE
SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU
PENDIDIKAN DI SMA TAMANSISWA
PEMATANGSIANTAR**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Manajemen Pendidikan Tinggi (M.Pd) Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara*

Oleh

LENI ROSNANI
1920060008



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS PERAN DAN KETERLIBATAN KOMITE
SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU
PENDIDIKAN DI SMA TAMANSISWA
PEMATANGSIANTAR**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Manajemen Pendidikan Tinggi (M.Pd) Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara*

Oleh

LENLROSNANI
1920060008

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama Mahasiswa : **LENI ROSNANI**
NPM : **1920060008**
Prodi/Konsentrasi : **Magister Manajemen Pendidikan Tinggi**
Judul Tesis : **ANALISIS PERAN DAN KETERLIBATAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMA TAMANSISWA PEMATANGSIANTAR.**

Pengesahan Tesis :

Medan, 01 September 2021

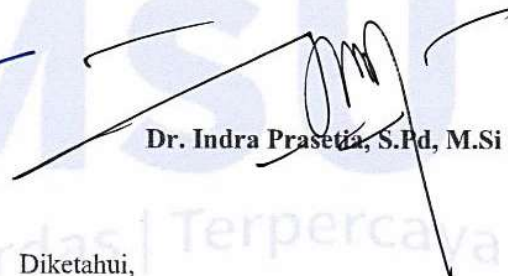
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Assoc. Prof. Dr. Akrim, M.Pd

Pembimbing II,



Dr. Indra Prasetia, S.Pd, M.Si

Unggul | cerdas | Terpercaya

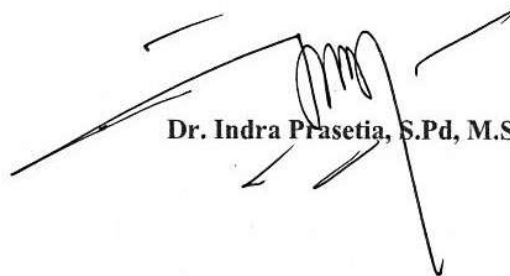
Diketahui,

Direktur,



Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Ketua Program Studi,



Dr. Indra Prasetia, S.Pd, M.Si

PENGESAHAN

ANALISIS PERAN DAN KETERLIBATAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMA TAMANSISWA PEMATANGSIANTAR


LENI ROSNANI
NPM : 1920060008

Program Studi : Magister Manajemen Pendidik Tinggi


Tesis ini dipertahankan dihadapan Panitia Penguji yang dibentuk oleh Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang gelar Magister Manajemen Pendidikan Tinggi (M.Pd) pada hari Rabu tanggal 01 September 2021

Komisi Penguji :


1. **Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd**
Ketua

1. 

2. **Dr. Amini, M.Pd**
Sekretaris

2. 

3. **Dr. Sri Nurabdiah Pratiwi, M.Pd**
Anggota

2. 

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

ANALISIS PERAN DAN KETERLIBATAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMA TAMANSISWA PEMATANGSIANTAR

Dengan ini Peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 01 September 2021

Penulis,



LENI ROSNANI
NPM : 1920060008

Motto

*Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan
dengan Penuh Keikhlasan, Menyelesaikan dengan
Penuh Kebahagiaan*

Persembahkan

Terimakasih kepada ayahanda dan ibunda,

tetesan keringatmu, jerih payahmu,

doa mu selalu menyertai langkahku.

Dukungan ayahanda dan ibunda

adalah kekuatan terdahsyat ananda

dalam menyelesaikan karya ini.

Terimakasih buat suamiku tercinta yang

selalu memberikan semangat

dan dukungan baik secara

moril maupun materil dari awal hingga

terselesaikannya tugas tesis ini.

**NALISIS PERAN DAN KETERLIBATAN KOMITE SEKOLAH DALAM
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMA TAMANSISWA
PEMATANGSIANTAR**

Leni Rosnani
1920060008

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan keterlibatan Komite Sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan diantaranya : (1) Komite Sekolah sebagai advisory agency (pemberi pertimbangan); (2) Komite Sekolah sebagai supporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan); (3) Komite Sekolah sebagai controlling agency (Pengontrol kegiatan layanan pendidikan); (4) Komite Sekolah sebagai mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dan pemerintah).

Penelitian merupakan penelitian kualitatif. Tempat penelitian di SMA Tamansiswa Pematangsiantar. Nara sumber penelitian anggota Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Guru. Pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi dengan sumber, Teknis analisis data dengan cara reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan sertaverifikasi.

Pada penelitian ini telah terjadi koordinasi yang baik antara Komite Sekolah dengan pihak sekolah. Komite Sekolah cukup berperan dalam pengelolaan pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar. Koordinasi dilakukan secara teratur dan pelaksanaan telah terorganisir dengan struktur yang jelas sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Kata kunci : *Komite Sekolah, mutu pendidikan.*

ANALYZE ABOUT THE ROLE OF SCHOOL COMMITTEE IN IMPROVING
THE QUALITY OF EDUCATION AT SENIOR HIGH SCHOOL
IN TAMANSISWA PEMATANGSIANTAR.

Leni Rosnani
1920060008

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of the School Committee in improving the quality of education, such as : (1) School Committee as advisory agency (giver of considerations); (2) School Committee as supporting agency (supporting educational service activities); (3) School Committee as controlling agency; (4) The School Committee acts as a mediator (to connect or link of communication between the public and the government).

This research is a qualitative research. The place of this research at Senior High School Tamansiswa Pematangsiantar. The informant of this resource persons are the School Committee, Headmaster, Vice Principals, and Teachers. The collecting data are using observation, interviews and documentation. The data validity is using the triangulation with the informant. Analysis techniques in a way data reduction, data presentation and taking conclusions and verification.

In this research the coordination that happening between the School Committee with the school. The Coordination is doing with regularly and implementation has been organized with the clearly structure so that can improve the quality of education.

Keywords: *School Committee, quality of education.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai dengan tepat waktu, Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada ruh junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Dan penulis merasa bersyukur karena sudah dapat menyelesaikan Tesis saya yang berjudul “**Analisis Peran dan Keterlibatan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar**”. Selama penyusunan proposal tesis ini, penulis memperoleh begitu banyak bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof.Dr.Agussani,MAP.,RektorUniversitasMuhammadiyahSumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar pada programPascasarjana.
2. Dr.SyaifulBahri,MAP.,DirecturProgramPascasarjanaUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan fasilitas sehingga terselesaikannya tesisini.
3. Prof. Dr. Akrim, M.Pd., Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini hingga selesai dan berhasil dengan baik.
4. Dr.Indra Prasetia, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister

Manajemen Pendidikan Tinggi, sekaligus Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini hingga selesai dan berhasil dengan baik.

5. Dr. Amini, M.Pd., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyusunan tesis ini sehingga menjadi lebih baik lagi.
6. Dr. Emilda Sulasmi, M.Pd., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyusunan tesis ini sehingga menjadi lebih baik lagi.
7. Dr. Sri Nurabdiyah Pratiwi, M.Pd., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyusunan tesis ini sehingga menjadi lebih baik lagi.
8. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
9. Staf perpustakaan, Biro Akademik, dan Pustekom Pascasarjana Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang membantu dalam pelayanan peminjaman referensi dan pengadaan jurnal sehingga memperlancar penyusunan tesis ini.
10. Keluarga Besar Perguruan Tamansiswa Pematangsiantar yang telah berkenan memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari akan kekurangan dalam tesis ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga kebaikan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis menjadi amal shaleh yang senantiasa mendapat balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT.Aamin....

Medan,Oktober 2021
Penulis,

Leni Rosnani
1920060008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATAPENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang	1
B. FokusPenelitian	10
C. RumusanPenelitian	11
D. TujuanPenelitian.....	11
E. KegunaanPenelitian	12
BAB II KAJIANPUSTAKA	14
A. KerangkaTeoritis	14
2.1PengelolaanSekolah.....	14

	2.2 Komite Sekolah	18
	2.3 Pemberdayaan Komite Sekolah.....	22
	B. Kerangka Konseptual.....	29
	C. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB	III METODE PENELITIAN	37
	A. Tempat Penelitian.....	37
	B. Waktu Penelitian	37
	C. Latar Penelitian	37
	D. Metode dan Prosedur Penelitian	38
	E. Data dan Sumber Data	40
	F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	41
	G. Prosedur Analisis Data	42
BAB	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
	A. Hasil Penelitian	47
	4.1. Gambar Umum Lokasi Penelitian	47
	4.2. Temuan Khusus Penelitian.....	57
	B. Pembahasan	73
BAB	V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran	82
	DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Jadwal Penelitian	37
Tabel 4.1.	Daftar Guru dan Staf Pegawai SMA Tamansiswa Pematangsiantar	53
Tabel 4.2.	Keadaan Siswa SMA Tamansiswa Pematangsiantar	55
Tabel 4.3.	Data Siswa SNMPTN SMA Tamansiswa Pematangsiantar	55
Tabel 4.4.	Keadaan Sarana dan Prasarana SMA Tamansiswa Pematangsiantar	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	31
Gambar 4.1. Struktur Organisasi SMA Tamansiswa Pematangsiantar.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan manusia tidak pernah maju dan sampai pada kesempurnaan. Wajar jika pendidikan mesti diberikan dari awal penciptaan manusia sampai berakhirnya kehidupan seorang anak manusia. Namun demikian, dalam pelaksanaan pendidikan itu tidak bisa dilaksanakan sendiri, tapi perlu ada lembaga pendidikan yang mewadahi proses pendidikan itu baik lembaga pendidikan swasta maupun negeri. Dalam menjalankan proses pendidikan tersebut, juga tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak adanya kerjasama antara semua pihak. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terkait saling membantu satu sama lain dan punya tugas dan peran masing-masing seperti kepala sekolah, majelis guru, komite sekolah, dan masyarakat.

Transformasi pendidikan di Indonesia berorientasi pada pendidikan manajemen berbasis sekolah perlu ditingkatkan. Peningkatan ini bukan hanya infrastruktur namun semua pemangku kepentingan, utamanya siswa, guru, sekolah, dan penyelarasan kurikulum. Prasetia, *et al* (2020:227) kriteria transformasi adalah kuantitas, kualitas dan konsistensi proses dan struktur internal yang mengubah input menjadi hasil. Seperti struktur dan isi kurikulum, kesehatan atau iklim sekolah dan interpersonal, tingkat motivasi siswa, kepemimpinan

kepala sekolah, kegiatan belajar mengajar guru, dan budaya sekolah. Padapelaksanaannya disadari bahwa mengimplementasikan sebuah perubahan memerlukan proses dan waktu. Dalam setiap organisasi perlu diingatkan bahwa tidak semua perubahan yang terjadi akan menimbulkan kondisi yang lebih baik hingga hal demikian tentu perlu diupayakan agar bila dimungkinkan perubahan diarahkan kearah yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Sebagaimana Sulasmi, dkk (2018) tujuan pendidikan adalah hasil-hasil yang hendak dicapai dari serangkaian proses pendidikan yang dilakukan. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, tujuan pendidikan berkaitan erat dengan substansi (isi) pendidikan.

Saat ini, era otonomi daerah peran sekolah dalam mengelola sekolah menjadi sangat tinggi. Dimana Depdiknas (2002:5) manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Nurkholis (2003:1) menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah terdiri dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Secara umum manajemen dapat diartikan sebagai proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Prasetia, *et al* (2020) dimana salah satu kunci keberhasilan organisasi tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalamnya. Banyak para pakar di bidang pendidikan yang percaya bahwa peningkatan kinerja dan

produktivitas sekolah berkaitan langsung dengan bagaimana mengelola sumber daya manusianya yang baik dan bukan lagi pada ketersediaan alat (sarana dan prasarana) maupun dana.

Ditinjau dari aspek pendidikan, manajemen pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah maupun tujuan jangka panjang. Kedua, kata berbasis mempunyai kata dasar basis atau dasar. Ketiga, kata sekolah merujuk pada lembaga tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Bertolak dari arti ketiga istilah itu, maka manajemen berbasis sekolah dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya yang berdasar pada sekolah itu sendiri dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pratiwi (2016:95) sekolah pada era otonomi saat ini, sangat dibutuhkan peningkatannya dalam meningkatkan sumber daya manusia, adanya pola manajemen berbasis sekolah memberi harapan besar bagi sekolah untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sesuai dengan kondisi sekolah. Oleh karena itu hasil dari pelaksanaan MBS di setiap sekolah tidak bisa sama. Tetapi semua sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sekolah yang berkualitas.

Kesempatan masyarakat untuk bersama-sama memperhatikan, mendukung serta membangun pendidikan memiliki wadah yang dinamakan komite sekolah. Masyarakat dapat menjalankan berbagai peran dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan baik melalui perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan.

Departemen Pendidikan Nasional, (2003) Komite Sekolah terbentuk sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 di dalam Salinan Lampiran II tanggal 2 April 2002 yang mengatakan bahwa Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Sebagaimana peraturan ini, komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh stakeholder pendidikan.

Departemen Pendidikan Nasional (2003) adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah yakni, 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan dana tetapi dengan melihat kepada tujuan terbentuknya komite sekolah semakin jelaslah bahwa komite sekolah bukan hanya pemberi dukungan dana melainkan sebagai wadah yang mampu menampung aspirasi masyarakat, mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya operasional sebagai wujud tanggung jawab

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat, orang tua siswa yang diwakili komite sekolah bukan lagi penonton dari luar pendidikan melainkan telah ikut serta dalam melaksanakan perannya dalam pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Komite sekolah di suatu sekolah tetap eksis, namun fungsi, tugas, maupun tanggung jawabnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Peran komite sekolah bukan hanya sebatas pada mobilisasi sumbangan, dan mengawasi pelaksanaan pendidikan esensi dari partisipasi komite sekolah adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat merubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf hidup dalam system manajemen pemberdayaan sekolah. Menurut Kurniadi dan Machali (2012:31) perencanaan adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis. Perencanaan berhubungan dengan masa mendatang dan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Perencanaan pendidikan mencakup (1). Tujuan, apa target yang hendak dicapai melalui perencanaan tersebut, (2). Posisi sistem pendidikan, bagaimana dengan kondisi sistem pendidikan saat ini, (3). Kebijakan dan prioritas yang bagaimana yang digunakan untuk mencapai tujuan, (4). Strategi yang bagaimana hendak dipergunakan dalam mencapai tujuan dari perencanaan tersebut. Selanjutnya Kurniadin dan Machali (2012:53), menyebutkan ciri-ciri perencanaan pendidikan sebagai berikut, dalam perencanaan pendidikan (1) mengutamakan nilai-nilai manusiawi, (2). memberi kesempatan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, (3).

memberikesempatanyangsamabagipesertadidik,(4).komprehensifdansistematis, (5) berorientasi kepada pembangunan serta mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan pada berbagai sektor pembangunan, (6) pengembangannya dengan memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai komponen pendidikan secara sistematis, (7) menggunakan sumber daya secermat mungkin sebab sumber daya yang tersedia langka, (8) berorientasi pada masa depan, (9) responsif terhadap kebutuhan yang berkembang di masyarakat, (10) sarana untuk mengembangkan inovasi pendidikan sehingga pembaruan terus menerusberlangsung.

Tujuan dibentuknya komite sekolah sesungguhnya adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya banyak terjadi ketidaksesuaian dengan apa yang menjadi harapan, di mana komite sekolah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Awie (2014:13) menjelaskan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh kalangan masyarakat pada saat ini khususnya pada lembaga pendidikan adalah dari setiap masing-masing jenjang pendidikan yang mutu pendidikannya sangat rendah. Kompri (2014:17) permasalahannya yaitu karena kurang terlibatnya masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Selain itu, permasalahan yang selalu

muncul, banyaknya anggota komite sekolah yang belum paham dengan fungsidan peran dalam memajukan mutu pendidikan. Kemudian adanya keengganan kalangan masyarakat untuk ikut mengembangkan dan memberdayakan komite sekolah sebagai bentuk penciptaan hubungan partisipatif antara masyarakat dengan sekolah.

Dari permasalahan di atas, dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya tingkat kemampuan dan kesadaran antara sekolah dengan masyarakat untuk sama-sama mengemban misi pendidikan. Sebagaimana pengelolaan pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar, dalam mengelola suatu lembaga, tidak hanya pihak sekolah saja yang harus berperan aktif, tetapi juga sekelompok masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah. Sebagaimana tujuan pembentukan komite sekolah itu sendiri adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai mitra kerja dari kepala sekolah dan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat mewujudkan fasilitas bagi guru dan peserta didik untuk belajar sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif.

SMA Tamansiswa Pematangsiantar adalah salah satu lembaga tingkat menengah atas yang sangat favorit terutama bagi masyarakat yang berada di Jalan RA. Kartini No 12 kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Barat, Kabupaten Simalungun. SMA Tamansiswa Pematangsiantar ini sesungguhnya sangat diminati oleh para peserta didik. Jumlah siswa dari tahun semakin meningkat, maka perlu adanya suatu organisasi sekolah yang mampu mengelola dan

mengembangkan lembaga yang kemudian dibentuknya suatu organisasi Komite Sekolah karena sangat dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa selalu diadakan rapat komite dalam menentukan sejumlah kebijakan strategis sekolah. Rapat komite yang diadakan tidak hanya atas dasar undangan dari sekolah saja, tetapi terkadang komite juga meminta pihak sekolah untuk mengadakan rapat komite jika ada hal-hal dan masukan dari masyarakat serta wali murid yang perlu disampaikan.

Namun demikian, pelaksanaan penyelenggaraan komite sekolah di SMA Tamansiswa Pematangsiantar juga memiliki permasalahan. Berdasarkan pengalaman penulis di lapangan permasalahan yang muncul yakni permasalahan hubungan dan kerjasama. Penciptaan hubungan kerjasama yang baik atas dasar kedudukan yang sama dengan penuh kesadaran akan kewajiban mengabdikan pada bangsa dan negara, secara khusus kesadaran dan kewajiban untuk membangun pendidikan nasional secara keseluruhan. Permasalahan yang dapat dirangkum, diantaranya masih terdapat keengganan orang tua peserta didik untuk hadir dalam rapat yang diadakan oleh sekolah berkaitan dengan kemajuan pendidikan. Selain itu, masih ada sikap antipatif orang tua atas pendidikan anaknya bahwa dengan merasa tugasnya selesai apabila sudah menyekolahkan anaknya dan telah membantu membayar biaya partisipasi pendidikan (sumbangan komite sekolah), serta banyak lagi problematika pendidikan peserta didik yang tidak mendapat perhatian orang tua sebagai upaya membantu terciptanya proses pembelajaran yang efektif, berkualitas, inovatif dan bersaing dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Meskipun telah diupayakan oleh pihak

sekolah, namun keterlibatan tersebut masih sebatas dalam bentuk dukungan dan untuk penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, keterlibatan orang tua peserta didik dalam mengambil keputusan tentang program-program sekolah, proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah serta evaluasi program belum dapat terealisasi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat dikatakan bahwa untuk mengimplementasikan konsep komite sekolah itu sendiri sangat tidak mudah, karena dilihat dari berbagai pengalaman yang sudah terjadi di lingkup masyarakat. Kesulitannya bukan bersumber pada konsep komite sekolah yang kurang jelas, melainkan budaya berorganisasi di lingkungan masyarakat belum berkembang. Sebagaimana menurut Pantjastuti (2008:84) penting adanya kegiatan sosialisasi maupun penyusunan berbagai pedoman operasional bagi pelaksanaannya konsep pemberdayaan masyarakat bagi sekolah. Tetapi, pada kenyataannya organisasi komite sekolah sangatlah penting guna meningkatkan mutu pendidikan yang akan menjadikan suatu lembaga sekolah lebih berkualitas.

Berdasarkan uraian tentang permasalahan di atas, menurut penulis untuk meningkatkan kerjasama yang efektif antara pihak sekolah dan komite sekolah, maka pihak sekolah perlu melakukan konsolidasi yang intensif dengan pihak komite sekolah, serta membangun komunikasi yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Dalam meningkatkan pengelolaan suatu lembaga, tidak hanya kepala sekolah saja yang berperan aktif, tetapi juga sekelompok masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Peran dan Keterlibatan Komite Sekolah dalam Pengelolaan Pendidikan di SMATamansiswa Pematangsiantar”.

B. Fokus Penelitian

Mengutip pendapat Mulyasa (2011: 65) maksud dibentuknya komite sekolah adalah agar suatu organisasi masyarakat sekolah mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah di suatu sekolah tetap eksis, namun fungsi, tugas, maupun tanggung jawabnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Sebagaimana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa komite sekolah / madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam pengelolaan pendidikan dan peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Dalam artian bahwa peran dan keterlibatan komite sekolah bukan hanya sebatas pada mobilisasi sumbangan, dan mengawasi pelaksanaan pendidikan esensi dari partisipasi komite sekolah adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat merubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf hidup dalam system manajemen pemberdayaan sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini yakni peran dan

keterlibatan komite sekolah dalam pengelolaan pendidikan di sekolah mencakup : (1) pemberi pertimbangan (*advisory*); (2) pendukung (*supporting*); (3) pengontrol (*controlling*); dan (4) mediator.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan keterlibatan komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar?
2. Bagaimana peran dan keterlibatan komite sekolah sebagai pendukung (*supporting agency*) dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar?
3. Bagaimana peran dan keterlibatan komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar?
4. Bagaimana peran dan keterlibatan komite sekolah sebagai mediator dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dan keterlibatan Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar.

2. Untuk mengetahui peran dan keterlibatan Komite Sekolah sebagai pendukung (*supporting agency*) dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar?
3. Untuk mengetahui peran dan keterlibatan Komite Sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar?
4. Untuk mengetahui peran dan keterlibatan Komite Sekolah sebagai mediator dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoretis
 - a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan peran dan keterlibatan komite sekolah dalam pengelolaan pendidikan di sekolah.
 - b. Diharapkan bermanfaat dan dapat merangsang peneliti lain untuk meneliti aspek-aspek lain yang belum tersentuh dalam penelitian ini.
 - c. Dapat dijadikan sebuah pertimbangan dan renungan bagi lembaga pendidikan dalam rangka pelibatan komite sekolah bagi peningkatan mutu pendidikan serta memperluas cakrawala keilmuan dalam manajemen pendidikan.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi lembaga atau sekolah dalam keikutsertaan komite sekolah untuk mengembangkan dan memajukan sekolah.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi lembaga pendidikan atau sekolah dalam kaitannya dengan pengelolaan pendidikan harus mengupayakan peran dan keterlibatan komite sekolah agar sekolah dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama, yakni harapan sekolah, pemerintah dan masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

2.1 Pengelolaan Sekolah

Istilah pengelolaan secara umum berkaitan dengan ilmu manajemen dan administrasi. Pengertian manajemen dapat dikutip dari berbagai pendapat, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:553) mendefinisikan manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen adalah pejabat pemimpin yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Al Rasyid (2005:17-18) manajemen pendidikan menekankan pada upaya seorang pemimpin dalam menggerakkan bawahan mengelola semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, manajemen sekolah dilaksanakan dalam suatu lingkup organisasi yang disebut sekolah, dan kepala sekolah sebagai pemimpin atas (*top manager*) disekolah.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola suatu kegiatan organisasi, lembaga, atau perusahaan, sangat diperlukan kiat-kiat pengelolaan atau manajemen agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan tujuan yang diharapkan dapat dicapai seoptimal mungkin.

Dilihat dari sistem pelaksanaannya, Robbin dan Coulter (2010:12) manajemen dikategorikan pada : (a) manajemen ilmiah (*scientific management*)

yaitu manajemen yang dicirikan oleh penggunaan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah, (b) manajemen tertutup mempunyai ciri dimana pemimpin membuat keputusan tanpa mengadakan konsultasi atau meminta pendapat dari bawahannya, (c) manajemen terbuka yaitu suatu sistem pelaksanaan manajemen dimana seseorang manajer atau pimpinan member kesempatan terlebih dahulu kepada bawahannya untuk memberikan saran atau pendapatnya sebelum mengambil keputusan, walaupun keputusan terakhir berada pada pimpinan. Bertitik tolak dari berbagai kategori manajemen tersebut, manajemen sekolah sebagai bagian dari manajemen pendidikan nasional, dalam perkembangannya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang menuntut penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang menggambarkan kategori manajemen tersebut. Sebagai pengaruh dari ideologi manajemen ilmiah, konsep manajemen yang implementasikan pada organisasi sekolah menggambarkan suatu aktivitas atau seni mengatur dan mengetahui secara tepat apa yang ingin dikerjakan melalui strategi dalam proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan penyelenggaraan sekolah dalam rangka mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misinya.

Para manajer pada setiap organisasi termasuk kepala sekolah sebagai manajer akan menghadapi tantangan baru mengenai doktrin dan dogma yang telah mapan karena itu hasil riset bidang manajemen merekomendasikan segera melakukan pengadaptasian pendekatan terhadap berbagai perubahan tersebut. Perubahan-perubahan fundamental tertentu dalam masyarakat telah dikukuhkan sebagai kesempatan yang relatif alami manajemen sekolah adalah bagaimana

pengambilan keputusan sekolah dilakukan dengan cermat mengimplementasikan konsep maupun teori manajemen dan keorganisasian. Oleh karena itu, manajemen sekolah harus dipahami sebagai usaha menumbuh kembangkan kekuatan dan potensi sumber daya sekolah untuk mengekplotasi peluang yang muncul sehingga mencapai tujuan pendidikan yang bermutu.

Sejalan dengan perkembangan manajemen tersebut, Muhaimin, dkk. (2011:21) pengertian manajemen khususnya manajemen sekolah ditinjau dari sudut proses yaitu proses kegiatan kerjasama manusia dalam suatu sistem sekolah untuk mencapai tujuan tertentu. Urutan-urutan proses kegiatan ini dimulai dari *planning* kegiatan, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* yang saling berinteraksi dan berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan Al Rasyid (2005: 16) ditinjau dari sudut fungsional, manajemen sekolah keseluruhan kegiatan sekolah atau fungsi-fungsi sekolah untuk mencapai tujuan yang direncanakan dan diinginkan. jika ditinjau dari sudut institusi, manajemen sekolah adalah suatu lembaga atau badan secara totalitas yang melakukan kegiatan-kegiatan organisasi seperti pelayanan belajar untuk mencapai tujuan institusi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa manajemen adalah proses merencanakan dan mempertahankan lingkungan dimana individu dapat bekerjasama dalam kelompok, secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Muhaimin, dkk. (2010:54) pengertian ini memberi arti (1) sebagai manajer melaksanakan fungsi manajemen antara lain ; perencanaan, pengorganisasian,

pembagian staf mengarahkan dan pengawasan; (2) menerapkan tujuan sekolah yang telah ditetapkan manajemen untuk perbaikan organisasi; (3) berlaku untuk manajer pada setiap level organisasi; dan (4) tujuan setiap manajer adalah sama untuk mencapai surplus, dimana manajemen concern terhadap produktivitas dan etos kerja yang tinggi berimplikasi efektivitas dan efisiensi.

Uraian di atas menegaskan bahwa manajemen sekolah adalah proses dan instansi yang memimpin dan membimbing penyelenggaraan pekerjaan sekolah sebagai suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan pendidikan dan ditetapkan. Oleh karena itu prinsip-prinsip manajemen sekolah yang dapat dipegang adalah memperoleh hasil yang paling efektif melalui orang-orang profesional mengacu pada visi dan misi sekolah dengan jalan melakukan proses manajemen, yakni menjalankan fungsi pokok program sekolah yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan sekolah sebagai penanggung jawab institusi sekolah, guru sebagai penanggung jawab pelayanan belajar pada peserta didik, dan tenaga kependidikan dan sebagai penanggung jawab pelayanan teknis kependidikan di sekolah yang menerapkan fungsi-fungsi manajemen itu, yaitu : perencanaan (*planning*) program kegiatan sekolah, pengorganisasian (*organizing*) tugas-tugas pokok sekolah, penggerakan (*actuating*) seluruh sistem sekolah, dan pengawasan (*controlling*) kinerja sekolah.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen sekolah diartikan sebagai proses pendayagunaan sumber daya sekolah melalui kegiatan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian secara efektif dan efisien dengan segala aspeknya dengan menggunakan semua potensi yang tersedia agar

tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta produktivitas sekolah yang bermutu. Mulyasa (2011:45) setiap sekolah melaksanakan manajemen peningkatan mutu dengan langkah-langkah (1) merumuskan visi, misi, tujuan, dan target peningkatan mutu secara berkelanjutan; (2) menyusun perencanaan sekolah menggunakan model perencanaan strategic; (3) melaksanakan program sekolah sesuai formulasi perencanaan; (4) melakukan evaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas serta kualitas penyelenggaraan program sekolah; (5) menyusun laporan kemajuan sekolah dan melaporkan kepada orang tua siswa kemajuan hasil belajar anak-anaknya di sekolah, melaporkan kemajuan sekolah kepada masyarakat dan stakeholders sekolah serta pemerintah daerah; dan (6) merumuskan program baru sebagai hasil evaluasi program sekolah dan berkelanjutan dan program yang telah dilaksanakan menggunakan perencanaan strategik sekolah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sekolah adalah proses merencanakan, mengorganisasikan dan memimpin serta mengendalikan penyelenggaraan sekolah sebagai suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan pendidikan dan ditetapkan. Manajemen sekolah diartikan sebagai proses pendayagunaan sumber daya sekolah melalui kegiatan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian secara efektif dan efisien dengan segala aspeknya dengan menggunakan semua potensi yang tersedia agar tercapai tujuan organisasi.

2.2 Pengertian, Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga nonpolitis atau nonprofit. Komite ini dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan pendidikan pada tingkat sekolah. Mereka bertanggungjawab membantu sekolah dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Menurut Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komite sekolah terdiri atas unsur; orangtua siswa, wakil tokoh masyarakat (bisa ulama/rohaniawan, budayawan, pemuka adat, pakar atau pemerhati pendidikan, wakil organisasi masyarakat, wakil dunia usaha dan industri, bahkan kalau perlu juga wakil siswa, wakil guru-guru, dan kepala sekolah). Adapun maksud dibentuknya komite sekolah adalah agar suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologi, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*), dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Mulyasa (2011:76) menyebutkan tujuan pembentukan komite sekolah adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Sagala (2009:251) tujuan pembentukan komite sekolah adalah untuk organisasi komunitas sekolah untuk menunjukkan komitmen dan loyalitas dan berusaha untuk meningkatkan kualitas sekolah. Komite sekolah yang berpendidikan dapat dikembangkan secara khusus dan didasarkan pada budaya, demografi, ekologi, nilai-nilai konsensus, dan pembangunan kepercayaan pada potensi masyarakat setempat. Kemudian Irawan (2004:16) menjelaskan bahwa komite sekolah merupakan suatu institusi yang dimunculkan untuk menampung aspirasi dan menyalurkan partisipasi dari pihak masyarakat dalam penyelenggaraan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Komite sekolah dapat memberikan dukungan kepada sekolah sebagai salah satu komunitas pemerhati pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran di lembaga sekolah. Kompri (2014:271) dalam rangka memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah, peran komite sekolah antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut: (1). Memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah, serta menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan; (2). Memberi dukungan

(*supporting agency*) kerja sama sekolah dengan masyarakat baik secara finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; (3). Mengontrol (*controlling agency*) kerja sama sekolah dengan masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan output pendidikan; (4)

Mediator antar pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat disatuan pendidikan

Komite sekolah bukan lembaga birokrasi baru. Kedudukan komite sekolah sama sekali tidak berada di bawah atau di atas kepala sekolah, melainkan sejajar. Komite sekolah juga sama sekali bukan sebagai institusi pemerintah, yang harus membuat pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Komite sekolah tak lain adalah orang tua dan masyarakat. Komite sekolah adalah badan mandiri yang menjadi wadah peran serta orang tua siswa dan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sekolah. Apabila suatu komite sekolah sudah dapat melaksanakan keempat perannya tersebut secara baik, diasumsikan bahwa komite sekolah tersebut dapat memberikan dampak terhadap kinerja sistem pendidikan yang ada. Dengan kata lain, keberadaan dan peran komite sekolah perlu menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan persekolahan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Depdiknas (2013: 13) menjelaskan komite sekolah memiliki fungsi yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Selain itu fungsi lainnya adalah

memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria kinerja daerah dalam pendidikan, kriteria tenaga kependidikan khususnya guru, kriteria fasilitas pendidikan dan yang berkaitan dengan pendidikan. Adapun fungsi lainnya yaitu mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan penggalangan dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Komite Sekolah bukan lembaga untuk memperluas layanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan. Namun, badan ini adalah badan independen yang bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menyalurkan aspirasi dan inisiatif masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan operasional dan program pendidikan di unit pendidikan.

2.3 Pemberdayaan Komite Sekolah

Salah satu ciri dari penerapan model manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah penyusunan rencana, program, dan kegiatan sekolah disusun secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Mulyasa (2006) dalam MBS, sekolah diharapkan mengenal kekuatan dan kelemahan, potensi, peluang dan ancaman yang dihadapi. Pengenalan diri sekolah tersebut, sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pendidikan yang akan diambil.

Berdasarkan analisis tersebut, sekolah merumuskan visi, misi, sasaran dan menyusun strategi serta menetapkan program penyelenggaraan pendidikan model MBS, mengharuskan setiap sekolah harus melibatkan masyarakat setempat

(berupa komite sekolah) dalam pengembangan pendidikan. Sumber-sumber yang ada dalam masyarakat diberdayakan seoptimal mungkin, baik sumber daya manusia maupun sumber dana untuk pendidikan. Sekolah menjadi tanggung jawab masyarakat (komite sekolah), dan sekolah tidak bekerja sendirian untuk memajukan pendidikan.

Keberadaan Komite Sekolah bersama Dewan Pendidikan secara legal formal telah dituangkan dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002. Berdasarkan peraturan tersebut, komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Untuk penamaan badan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Madrasah, Majelis Sekolah, atau nama lainnya. Komite sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Adapun tujuan komite sekolah menurut Tilaar (2004:43) yaitu: 1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan pengembangan untuk jangka waktu tertentu. MBS dikembangkan dengan kesadaran bahwa setiap sekolah memiliki kondisi dan situasi serta kebutuhan yang berbeda-beda prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, 2) meningkatkan tanggungjawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan 3) menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Adanya sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya. Dengan pemberdayaan komite sekolah secara optimal, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan, sebab dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah selalu melalui mekanisme pengawasan komite sekolah yang di dalamnya terdapat wakil masyarakat. Pemberian dana pusat ke sekolah secara block grant mempersyaratkan adanya pengawasan dari komite sekolah atau dewan pendidikan. Dengan begitu, penggunaan dana balik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar terpantau alokasinya sesuai dengan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan satuan pendidikan. Dalam batas operasional, Komite Sekolah melahirkan kebijakan pengelolaan dana masyarakat, meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif masyarakat, serta menciptakan suasana kondusif, transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan. Upaya peningkatan mutu akan lebih awal tercapai jika kepala sekolah dan Komite Sekolah menjadi tim yang kompak dan cerdas.

Kerjasama itu tidak hanya sebatas penyediaan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tetapi lebih baik lagi jika keduanya menyatukan langkah untuk meningkatkan kesadaran, kebersamaan, dan perhatian orangtua

terhadap pentingnya pendidikan. Tentunya, yang pertama dan yang paling utama adalah dengan membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, untuk mewujudkan kondisi yang memadai Mulyasa (2004:12) mengemukakan bahwa tanggung jawab masyarakat mengandung pengertian bahwa masyarakat harus membantu terlaksananya pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, dan dapat menciptakan kondisi belajar untuk mewujudkan pendidikan seumur hidup. Uraian di atas secara lebih tegas dapat dimaknai bahwa sumbangan masyarakat diharapkan tidak hanya berbentuk materi tetapi tenaga dan pemikiran. Namun demikian, harapan di atas belum sepenuhnya terwujud. Bentuk dan sifat peranserta masyarakat pada umumnya masih dalam pemberian sumbangan dana, misalnya pembayaran SPP dan iuran dana Komite Sekolah. Hal ini tidak terlepas dari semakin terbatasnya berbagai sumber pendukung dari pemerintah. Masalah lain yang terjadi dilapangan, kehadiran Komite Sekolah cenderung sebagai badan legalitas (stempel) yang mengesahkan berbagai pungutan dana oleh pihak sekolah. Disamping itu pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan (orangtua, masyarakat sekitar, bahkan guru) kurang mengetahui tentang fungsi dan peran Komite Sekolah. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa Komite Sekolah sama saja dengan BP3, alias ganti kulit semata. Ini berarti sosialisasi tentang Komite Sekolah belum terlaksana dengan baik kepada masyarakat bahkan kepada Komite Sekolah itu sendiri. Hasil penelitian Slamet Lestari dan Tina Rahmawati (2005:28) juga menunjukkan bahwa Komite Sekolah belum dapat menjalankan peran untuk

mendukung program kerja sekolah secara optimal, dikarenakan adanya kurangnya komunikasi pihak sekolah dengan komite sekolah (kesibukkan pengurus komitesekolah).

Pemberdayaan komite sekolah merupakan alternatif pengelolaan sekolah dengan harapan mampu mendorong terwujudnya mutu pendidikan. Mengapa Komite Sekolah perlu diberdayakan. Hasil penelitian Slamet Lestari(2005:28)menunjukkan bahwa keberadaan Komite Sekolah masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pelaksanaan peran Komite Sekolah masih belum optimal (Slamet Lestari dan Tina Rahmawati, 2005:19). Hasil penelitian tersebut menunjukkan kepada kita bahwa Komite Sekolah memang harus lebih diberdayakan. Dengan kata lain, Komite Sekolah perlu direvitalisasi sehingga lembaga ini benar-benar menjadi lebih mandiri. Komite Sekolah benar-benar menjadi lembaga masyarakat yang "duduk sama rendah, berdiri sama tinggi' jika disejajarkan dengan posisi kepala sekolah pada satuan pendidikan. Komite Sekolah tidak boleh hanya menjadi "lembaga stempel" dari kepalasekolah.

Demikian juga, Komite Sekolah juga tidak boleh menjadi "eksekutor" yang ditakuti oleh kepala sekolah. Sebaliknya, Komite Sekolah harus dapat menjadi mitra sejajar dengan kepala sekolah. Menurut Mulyasa (2006:64) agar pemberdayaan Komite Sekolah menjadi lebih optimal kepada pemerintah dan instansi terkait disarankan tentang beberapa halberikut:

- 1) Peran Komite Sekolah dan MBS perlu disosialisasikan secara komprehensif

kepada guru dan kepala sekolah. Demikian pula sebaliknya, peran kepala sekolah dan MBS juga perlu disosialisasikan kepada Komite Sekolah. Hal ini memiliki tujuan untuk menghindari persepsi yang keliru terhadap peran masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan pengetahuan dan pemahaman peran stakeholders yang lebih baik, harapan untuk menumbuhkan "rasa memiliki" dan "rasa saling mempercayai" menjadikenyataan.

- 2) SDM komite sekolah perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan/atau membuat persyaratan pendidikan minimal untuk menjadi anggota Komite Sekolah. Latar belakang pendidikan yang memadai membuat pola pikir Komite Sekolah dapat bersinergi dengan kepala sekolah. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan tentang manajemen pendidikan menjadikan Komite Sekolah sebagai kuda tunggangan atau sebagai stempel untuk melegalisasi berbagai pungutan yang dapat meresahkan masyarakat.
- 3) Pemberdayaan komite sekolah akan lebih berhasil jika kepemimpinan kepala sekolah lebih efektif dan menjadi teladan bagi warga sekolah dan masyarakat. Karena itu, implementasi Komite Sekolah pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah sangat memerlukan figur kepala sekolah yang mempunyai kapabilitas, kredibilitas, dan daya juang yang tinggi berdasarkan kepemimpinan yang amanah.
- 4) Pemberdayaan komite sekolah dapat dilakukan secara *bottom up* oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, setiap Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota harus memiliki tenaga fasilitator yang mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan kepada Komite Sekolah. Kegiatan pendampingan ini

dikoordinasikan oleh fasilitator dari Dewan Pendidikan Provinsi.

Konsep pemberdayaan Komite Sekolah ini merupakan peningkatan dari kegiatan sosialisasi yang biasanya telah dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota selama ini. Kegiatan sosialisasi lebih merupakan kegiatan pertemuan, yang isinya berupa ceramah dan tanya jawab. Peserta kegiatan ini biasanya massal, dan selepas pertemuan, peserta biasanya akan kembali kepada kebiasaan lama, tidak banyak mengubah pola pikir (mindset). Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi seperti itu hanya berupa penyampaian informasi. Lalu, apakah informasi itu dilaksanakan atau sedikit menjadi perhatian Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi itu perlu ditingkatkan menjadi kegiatan pemberdayaan, dengan titik berat sebagai kegiatan pendampingan kepada setiap kelompok Komite Sekolah, menyerap langsung masalah yang dihadapi, dan kemudian bersama-sama Komite Sekolah berusaha untuk memecahkannya. Hadiyanto (2004:61), usaha pemberdayaan Komite Sekolah tersebut dapat dinilai berhasil jika telah tercapai beberapa indikator sebagai berikut: (1). Proses pembentukan Komite Sekolah dilakukan melalui proses dan mekanisme yang demokratis, transparan, dan akuntabel, (2). Tidak ada lagi Komite Sekolah "stempel" dan Komite Sekolah "eksekutor". Dengan kata lain, Komite Sekolah yang berhasil dibentuk adalah Komite Sekolah yang memiliki semangat kemitraan dengan sekolah, (3). Bila ada permasalahan antara sekolah dan Komite Sekolah dapat diselesaikan secara mandiri oleh Tim Fasilitator, atau setidaknya dapat diselesaikan pada tingkat Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota, (4). Secara bertahap diharapkan agar Komite Sekolah segera

dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolahnyamasing-masing.

B. KerangkaKonseptual

Dalam iklim yang kompetitif sekarang ini, sulit bagi organisasi untuk dapat hidup dengan baik jika tidak memiliki kemampuan untuk merubah diri dengan cepat dan mampu berkembang seiring dengan tuntutan stakeholder. Kondisi ini berlaku hampir pada keseluruhan organisasi baik yang bersifat profit maupun yang bersifat non-profit. Sekolah/madrasah sebagai lembaga pendidikan yang termasuk juga lembaga non-profit juga tidak terlepas dari fenomena ini, itulah sebabnya dalam banyak hal lembaga pendidikan harus mengetahui berbagai harapan dan kebutuhan stakeholder. Pemerintah dalam hal ini telah memberikan regulasi kepada lembaga pendidikan untuk selalu menyertakan stakeholder dalam seluruh kegiatan melalui apa yang disebut dengan komitemadrasah.

Secara konseptual bahwa komite sekolah merupakan lembaga mandiri dan bersifat independen. Kedudukan komite sekolah tidak dibawah bayang-bayang kekuasaan kepala sekolah. Kedudukan kepala sekolah sama sekali tidak sebagai ”pembina” seperti kedudukan BP3 pada era sebelumnya. Independensi kedudukan dan peran tersebut menjadi terganggu, misalnya hanya karena salah satu sumber anggaran komite sekolah mungkin berasal dari rencana anggaran penerimaan dan belanja sekolah (RAPBS). Dengan tersedianya anggaran dalam RAPBS tersebut, maka ada anggapan bahwa komite sekolah menjadi lembaga birokrasi yang berada

di bawah kepala sekolah, bahkan di bawah kepala dinas pendidikan. Penyediaan anggaran komite sekolah dalam RAPBS tidak berarti anggaran itu bukan dari kepala sekolah, melainkan bersumber dari keluarga dan masyarakat.

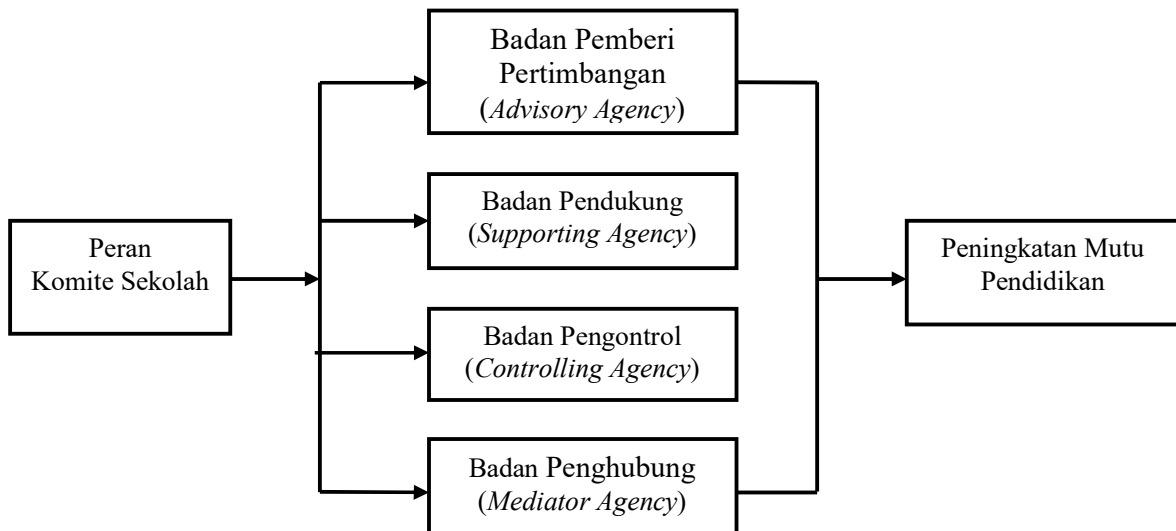
Salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah. Seiring dengan kemajuan zaman, di mana era keterbukaan menjadi salah satu landasannya, keterlibatan masyarakat sekitar dan orang tua peserta didik yang diwadahi melalui komite sekolah, tidak berarti juga proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah lepas dari permasalahan.

Peran komite sekolah tidak terbatas pada memobilisasi sumbangan. Pemantauan implementasi aspek pendidikan dari partisipasi komite sekolah berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah, yang dapat mengubah sikap, keterampilan, dan distribusi otoritas di antara individu dan masyarakat dalam rangka meningkatkan keterampilan manusia untuk meningkatkan standar hidup di sekolah. sistem manajemen pemberdayaan.

Sinergi antara komite sekolah dan sekolah menciptakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra dalam pengembangan pendidikan. Dari sini, komunitas dapat menyalurkan berbagai gagasan dan

berpartisipasi dalam mempromosikan pendidikan di wilayah tersebut. Komite sekolah bukan lembaga untuk memperluas layanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan. Namun, badan ini adalah badan independen yang bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menyalurkan aspirasi dan inisiatif masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan operasional dan program pendidikan di unit pendidikan.

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual



C. Penelitian Terdahulu

Mempelajari hasil dari penelitian yang dialami oleh peneliti lain berarti mencari pengalaman yang lebih mendalam terkait subjek yang diteliti. Dalam artian, hasil penelitian terdahulu dapat menjadi landasan dari konsep, teori, dan generalisasi penelitian yang akan dikaji. Beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rufaidah yang berjudul “Implementasi

Peranan Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Standar Nasional Kecamatan Lumajang”. Hasil penelitian ini adalah bahwa peranan komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di Sekolah Dasar Standar Nasional Kecamatan Lumajang menempati posisi strategis sebagai mitra dan salah satu pilar Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Peranan ini dirasakan baik yang bersifat eksternal maupun internal dengan sistem pendekatan analisis SWOT, komite sekolah lebih dapat menilai faktor kekuatan yang dimilikinya sebagai penunjang kinerja dan mengatasi faktor kelemahan serta tantangan dengan kreativitas dan inovasi sehingga kehadirannya sangat diharapkan.

2. Penelitian yang ditulis oleh Nur Hasanah, Mahasiswa Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2016 dengan judul “Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: *Pertama*, mutu pendidikan Madrasah Aliyah di Kecamatan Wedarijaksa dapat dikatakan sudah baik, namun harus terus ditingkatkan. *Kedua*, optimalisasi Komite Madrasah telah dilaksanakan di Madrasah Aliyah Se- Kecamatan Wedarijaksa dengan keempat perannya yaitu sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pemberi dukungan (*supporting agency*), badan pengontrol (*controlling agency*) dan badan penghubung (*mediator agency*), namun masih belum maksimal. *Ketiga*, faktor pendukung meliputi: pembentukan dan pemilihan komite madrasah dilakukan secara musyawarah kekeluargaan, hubungan kerja sama komite dan kepala

madrasah yang lebih mudah, dan dukungan kuat masyarakat terhadap madrasah. Sedangkan faktor penghambat meliputi minimnya pengetahuan tentang tugas-tugas komite madrasah, dan kurangnya independensi dan profesionalitas komite madrasah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Weny Firdausin Nuzula yang berjudul “Peran Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Studi Multi Kasus Di Mts Ma’arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung)”. Hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa: (1) peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah meliputi: memberikan pertimbangan terkait penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam hal sarana prasarana yang mendukung kegiatan akademik maupun nonakademik (pada bidang akademik memprioritaskan kenyamanan proses KBM antara guru dan murid, untuk nonakademik pada kegiatan ekstrakurikuler), memberikan pertimbangan pada pengembangan kurikulum muatan lokal, dan memberi pertimbangan untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya pendidikan sekolah; (2) peran komite sekolah sebagai badan pendukung dalam implementasi manajemen berbasis sekolah meliputi: memberikan dukungan dalam hal finansial dengan mencarikan alternatif sumber pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah, memberikan dukungan dalam hal pemantauan terhadap kondisi pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki potensi untuk meningkatkan kualifikasinya melalui program beasiswa, maupun program kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi yang diselenggarakan

dalam lingkup sekolah maupun di luar sekolah, dan memberikan dukungan dalam hal pengelolaan anggaran pendidikan; (3) peran komite sekolah sebagai badan pengontrol dalam implementasi manajemen berbasis sekolah meliputi: mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, mengontrol proses pengambilan kebijakan kepala sekolah tanpa mengintimidasi keputusan sekolah, memantau (proses KBM siswa, pelaksanaan UN, dan kegiatan ekstrakurikuler dalam pengembangan minat bakat siswa, karena ekstrakurikuler juga dapat menjadi peluang prestasi yang membanggakan bagi sekolah), melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran, dan memantau output sekolah dengan melakukan pengawasan hasil ujian akhir, memantau hasil prestasi yang didapat dari bidang akademik maupun nonakademik, sedangkan untuk memantau alumni pihak komite tidak berdiri sendiri, tetapi dibantu oleh pihak alumni tingkat dan pihak sekolah yang berupa bentuk lisan dan tertulis. Untuk bentuk tertulis melalui pendataan dari sekolah; (4) peran komite sekolah sebagai badan penghubung dalam implementasi manajemen berbasis sekolah meliputi menghubungkan sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat (wujud dalam hubungan tersebut melakukan koordinasi atau pertemuan-pertemuan secara formal meskipun tidak rutin dilaksanakan), menghubungkan sekolah dengan masyarakat (cara yang dilakukan adalah menampung aspirasi masyarakat, dalam hal ini dapat berupa pengaduan keluhan maupun saran terhadap kebijakan dalam program pendidikan), dan melakukan mediasi terhadap instansi lain. Instansi disini yang dimaksud adalah alumni, dan kalangan pejabat pemerintah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Herisfina Fauziah yang berjudul “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 03 Cisauk”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran komite sekolah di SMPN 03 Cisauk dalam meningkatkan mutu pendidikan Cisauk cukup optimal di dalam beberapa peran seperti peran komite sebagai pemberi pertimbangan, dan sebagai mediator. Namun, sebagai badan pengontrol dan pendukung perannya belum optimal. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, dan sebagai mediator sudah optimal dapat dilihat dari cukup aktifnya komite dalam mendukung program-program yang ada di sekolah baik yang bersifat akademik maupun nonakademik. Selain itu, komite sekolah juga memberikan ide-ide serta saran kepada sekolah terkait program-program yang ada di sekolah serta ikut serta dalam mendanai program sekolah yang telah disetujui oleh komite sekolah. Komite sekolah juga telah menjembatani dengan baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa sehingga jika terjadi keluhan orangtua langsung bisa berkomunikasi dengan komite. Namun, dalam menjalankan perannya sebagai badan pengontrol dapat dilihat belum optimal. Hal ini dikarenakan komite memiliki pekerjaan masing-masing di luar tugas mereka sebagai komite sekolah. Begitu juga peran komite sebagai pendukung belum baik. Hal ini terjadi karena komite masih melakukan pungutan terhadap orang tua siswa yang diperuntukkan untuk pembangunan sarana-prasarana.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Aziz Abdillah yang berjudul “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMAN 28 Kabupaten Tangerang”. Hasil penelitian yaitu peran komite sekolah dalam meningkatkan

mutu pendidikan di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang yang sebenarnya dinilai cukup baik. Berikut peranyang belum dilaksanakan:

1) sebagai pertimbangan (identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, menyelenggarakan rapat RAPBS, identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat); 2) sebagai pendukung (memantau kondisi ketenagaan pendidikan sekolah, mobilisasi guru sukarelawan dan nontenaga pendidik untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah, evaluasi dukungan sarana prasarana, memantau kondisi anggaran); 3) sebagai pengontrol (memantau organisasi sekolah, memantau angka mengulang dan bertahan siswa di sekolah); 4) sebagai mediator (penghubung antara komite sekolah dengan dewan pendidikan), yakni belum maksimalnya koordinasi dengan masyarakat dan orang tua murid.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Tamansiswa Jalan R.A Kartini No. 12 Pematangsiantar, Kotamadya Pematangsiantar, Sumatera Utara.

B. Waktu Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2020/2021											
		Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1	Pengajuan judul												
2	Penulisan proposal												
3	Bimbingan proposal												
5	Seminar proposal												
6	Pengumpulan Data												
7	Analisis Data												
8	Penyusunan membuat Tesis												
9	Bimbingan Tesis												
10	Seminar Hasil Tesis												
11	Sidang Tesis												

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar. Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya peran dan keterlibatan komite sekolah di SMA Tamansiswa Pematangsiantar.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Arifin (2011:14) menyebutkan proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap orang dalam kehidupannya, berinteraksi dengan mereka, berupaya memahami bahasa serta tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu peneliti harus terjun ke lapangan dengan waktu yang cukup lama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu studi kasus tentang “peran dan keterlibatan komite sekolah dalam pengelolaan sekolah (Studi kasus di SMA Tamansiswa Pematangsiantar)”. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu, kelompok atau lembaga yang dianggap memiliki atau mengalami kasus tertentu. Menurut Manaf (20015:19) studi kasus adalah eksplorasi dari sistem terikat atau sebuah kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data mendalam dan mendetail yang melibatkan sumber-sumber informasi yang banyak dengan konteks yang kaya.

Peneliti memilih jenis penelitian studi kasus karena dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti sebuah aktivitas secara intensif dan rinci. Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahap-tahap penelitian. Menurut Moleong (2012: 127-148), ada empat tahapan dalam

pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pralapangan

Peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari subjek sebagai narasumber. Selama proses survei ini peneliti melakukan penjajakan lapangan (*field study*) terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data.

3. Tahap analisis data

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah analisis data. Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu peneliti juga menempuh proses triangulasi data yang diperbandingkan dengan teori kepustakaan.

4. Tahap evaluasi dan pelaporan

Pada tahap ini peneliti berusaha melakukan konsultasi dan bimbingan dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan digali langsung dari pihak yang berada di SMA Tamansiswa Pematangsiantar. Adapun sumber data dalam penelitian ini peneliti kelompokkan menjadi:

a. Sumber data primer. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi lapangan secara langsung dan wawancara dengan subjek penelitian. Data ini bersumber dari ucapan atau tindakan yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan observasi atau pengamatan langsung pada objek selama penelitian di lapangan yang kemudian peneliti catat dalam bentuk catatan tertulis, rekaman, serta pengambilan foto. Data-data primer akan peneliti peroleh dengan teknik *purposive atau purposeful sampling*. Arikunto (2002:115) menjelaskan informan yang dipilih adalah orang-orang yang berkompeten atau berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan fokus penelitian. Adapun informan tersebut meliputi: Komite Sekolah, Kepala

Sekolah, Wakil Kepala sekolah, dan Guru SMA Tamansiswa Pematangsiantar.

b. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data-data pendukung atau pelengkap penelitian berupa dokumen-dokumen pendukung. Data ini bisa diambil dari tulisan atau berbagai paper yang berkaitan dengan judul tesis ini. Selain itu, peneliti menggali informasi dari alumni, orang tua, atau masyarakat sekitar.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Teknik observasi digunakan untuk mengamati kejadian atau peristiwa yang terjadi serta perilaku para anggota madrasah selama berada di lokasi penelitian. Berdasarkan dua bentuk keterlibatan yaitu partisipasi dan pengamatan, maka ada empat tipe yang perlu diperhatikan, Sebagaimana Creswell (2007:212) yaitu: (1). Partisipasi sempurna, peneliti terlibat secara penuh dengan masyarakat yang sedang diamatinya; (2). Partisipan sebagai pengamat, peneliti berpartisipasi dalam aktivitas ditempat penelitian; (3). Nonpartisipan/pengamat sebagai partisipan, peneliti merupakan outsider dari kelompok yang sedang diteliti, menyaksikan, dan membuat catatan lapangan dari kejauhan; (4). Pengamat sempurna, peneliti tidak terlihat atau diketahui oleh masyarakat yang sedang diteliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memposisikan diri sebagai instrumen yang bisa berubah peran. Peneliti melibatkan diri dalam kegiatan yang dilakukan subjek penelitian, namun tidak semuanya. Peneliti hanya melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang dipandang akan memberikan informasi yang berharga terhadap penelitian yang dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan perannya antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Teknik kedua adalah wawancara. Wawancara dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Menurut Herdiansyah (2013:65) wawancara terstruktur dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan sehingga terlihat adanya garis tegas antara peneliti dan subjek penelitian. Wawancara semi

terstruktur dilakukan karena peneliti diberi kebebasan sebeb-bebasnya dalam bertanya, mengatur alur dan setting wawancara, tidak ada pertanyaan yang disusun sebelumnya, peneliti hanya mengandalkan guideline wawancara. Wawancara tak terstruktur hampir sama dengan wawancara semi terstruktur hanya saja wawancara ini memiliki kelonggaran dalam banyak hal termasuk pedoman wawancara.

Beberapa teknik wawancara tersebut digunakan karena informan yang menjadi sumber data mempunyai kesibukan berbeda-beda. Kemudian peneliti akan mendatangi satu persatu informan yang menjadi sumber data di atas. Selanjutnya, dalam riset dokumen merupakan proses pengumpulan data yang populer dalam studi kasus dan riset naratif. Peneliti akan menggunakan adalah dokumen pribadi meliputi mengumpulkan catatan pribadi, autobiografi, diary, menulis catatan lapangan selama riset, dan beberapa dokumen resmi meliputi program perencanaan dan program pelaksanaan pengembangan budaya sekolah, program kerja kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dokumen profil sekolah, dokumen data guru, foto kegiatan budayasekolah.

G. Prosedur Analisis Data

Penelitian ini juga diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan pemahaman dari sebuah kasus mengenai pemberdayaan guru di Perguruan Tamansiswa Pematangsiantar. Peneliti juga akan mengamati secara berkala terhadap fenomena-fenomena yang terjadi terkait fokus penelitian ini baik yang tampak dari situasi serta kondisi objek penelitian yang informasinya dapat

diperoleh dari berbagai informan dan dokumen pendukung lainnya.

Mengingat bahwa penelitian kualitatif menggunakan logika induktif, maka konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan oleh peneliti berdasarkan kejadian, peristiwa, dan fenomena yang ada di lapangan. Maka dari itu, antara proses pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian ini menjadi satu kegiatan yang integral dan sekaligus simultan. Peneliti akan mengikuti model Miles dan Huberman dalam melakukan analisis data. Data-data yang dianalisis melalui beberapa tahapan-tahapan, sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:337) analisis data kualitatif terdiri dari *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Pengumpulan Data (*DataCollection*)

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik pengumpulan data yang telah dilakukan, yaitu penggabungan dari berbagai jenis teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Semakin banyak data yang terkumpul, maka hasil penelitian yang didapat semakin bagus. Pengumpulan data akan peneliti lakukan sepanjang data masih diperlukan.

2. Reduksi Data (*DataReduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan

n cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.

Data yang sudah dipilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Semua data itu dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang telah terkumpul dan mengambil data-data yang penting dan pokok serta membuang data yang tidak diperlukan supaya tidak tercampur dengan data yang pokok.

Semua data yang didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi akan dikaitkan satu sama lain. Kemudian peneliti menganalisa dan memilah lagi data yang ada relevansinya dengan fokus penelitian untuk dijadikan lebih sederhana, demikian juga dengan data-data yang lain. Data yang telah direduksi akan dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan dimensi permasalahan yang akan dicarjawabannya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, tahap berikutnya adalah tahap penyajian data. Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan

informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *chart* dan sejenisnya. Melalui penyajian data dalam bentuk *display*, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan *flowchart*. Penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

Setelah mendapatkan hasil reduksi data dari berbagai komponen permasalahan penelitian yang diangkat, maka dilakukan penyimpulan sementara untuk menggambarkan tentang permasalahan penelitian.

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah verifikasi, yaitu memverifikasi data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang terpercaya (*credible*). Kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban dari fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal dan dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kesimpulan yang diperoleh juga dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi data dengan data yang valid dan berkualitas sebagaimana adanya, sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan juga memiliki kualitas tinggi dan baik. Apapun kesimpulan yang didapat, apakah kesimpulannya menjawab fokus

penelitian awal atau tidak merupakan hal yang biasa, karena penelitian kualitatif lebih bersifat dinamis dan tidakstatis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah SMATamansiswa

SMA Swasta Tamansiswa Cabang Pematangsiantar merupakan bagian dari Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar yang didirikan pada tanggal 03 Juli 1933. SMA Swasta Tamansiswa sebagai salah satu wadah bagi lulusan SMP di lingkungan Kota Pematangsiantar dan sekitarnya. Lingkungan Sekolah Tamansiswa selalu senantiasa asri dan sejuk dipandang karena berusaha untuk menjagalingkungannya.

Perguruan Tamansiswa berdiri pada masa sebelum Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 3 Juli 1933 membuat Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar berada di masa-masa yang sulit. Bagian Perguruan yang mula-mula dibuka adalah Taman Muda (SD) sebanyak 2 kelas dengan jumlah siswa 50 Orang. Sementara Pamong yang mengajar berjumlah 15 Orang dengan itikad melaksanakan tugas Mengabdikan Kepada Sang Anak tanpa pamrih (Rame Ing Gawe Sepi Ing Pamrih). Lokasi Perguruan juga selalu berpindah-pindah (belum menetap) dengan cara meminjam rumah, paviliun, atau sekedar halaman sebagai tempat belajar. Perguruan juga sempat menumpang di madrasah-madrasah antara lain Madrasah Al Jamiyatul Washliyah di Jalan Raya Pematangsiantar.

Semua kendala yang dihadapi pada awal pendiriannya tidak menyurutkan perjuangan para tokoh pendiri Tamansiswa di Pematangsiantar untuk terus mengembangkan ajaran Tamansiswa. Sebelum menetap di Jalan Kartini Nomor 18 seperti saat ini, beberapa lokasi yang dahulunya pernah digunakan tempat belajar Perguruan antara lain:

1. Jalan Sibolga (gedung lama di depan SMP Negeri12)
2. Jalan Jend.Sudirman (gudang motor di depan praktekdr.Pardede)
3. Jalan Kartini (rumah DinasKehutanan)
4. Jalan Raya (Perguruan Al Washliyah sekarangYPHI)
5. Jalan Simarito (halaman rumah Letkol. dr. Harno Pijati sekarang Bank Indonesia)
6. Jalan Kartini (komplek PutrayaniPanti)

Pada awal pendiriannya tercatat beberapa nama tokoh-tokoh yang berjasa di Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar, yaitu:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ki H. MuhammadAyyubJabbar | 9. Ki Sutan RajaAlam |
| 2. KiLagutSiregar | 10. Ki Abdul CholilNasution |
| 3. Ki H.TorkisSiregar | 11. Ki BialHarahap |
| 4. KiIdrisSiregar | 12. Ki MasSumono |
| 5. Ki AbdulRahmanPasaribu | 13. Ki MasRasyid |
| 6. KiAdamSiregar | 14. NyiRamlah |
| 7. Ki SyarifulWahidinNasution | 15. Ki AmirSiregar |
| 8. Ki R.Pandoyo | |

2. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : SMA Tamansiswa Pematangsiantar Alamat
: Jalan kartini No.18

RT/RW :001/006

Kelurahan :Banjar

Kecamatan : SiantarBarat

Kota :Pematangsiantar

Provinsi : SumateraUtara

KodePos : 21112

PosisiGeografis : 2,957 Latitude / 99,055Longitude

Email : sma.tamansiswa.pematangsiantar@gmail.com

Website : <http://smatamansiswasiantar.sch.id/>

No.Telepon/Faximili :0622-29862/0622-22503

No.IzinOperasional : 420/4302DM/2013, Tanggal 26 Agustus 2013

NPSN : 10212417

NSSS : 3040 76306002

NIS : 300030

NDS : G.14014004

KodeSekolah : 0204015

Bank : 1. BPD SUMATERAUTARA

Atas nama :

DANABOSSMATAMANSISWA

2. PT. BANK BNI 46 Atas nama :

SMA SWASTA TAMAN SISWA

NPWP	:01-136-525-1-117-001
Waktu Penyelenggaraan	: Pagi
SumberDaya	: PLN Daya 13.200Watt
SumberAir	: SumurBor
AksesInternet	: Telkom Speedy No.Pelanggan9014004990532
JenjangAkreditasi	:A
Nomor/Tgl.Akreditasi	: Ma 030374 / 01 Nopember 2016 Kurikulum : Kurikulum2013
ProgramPeminatan	: 1. Matematika dan Ilmu PengetahuanAlam(MIPA) 2. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

a. Visi Sekolah:

Sebagai sekolah berwawasan kebangsaan, unggul dalam IPTEK berlandaskan Mutu Religius untuk mewujudkan manusia yang berbudi pekerti luhur.

b. Misi Sekolah:

1. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran.
2. Menumbuh kembangkan semangat keunggulan dan bernalar sehat kepada peserta didik, pamong (guru) dan pegawai sehingga kemauan kuat untuk terus maju.

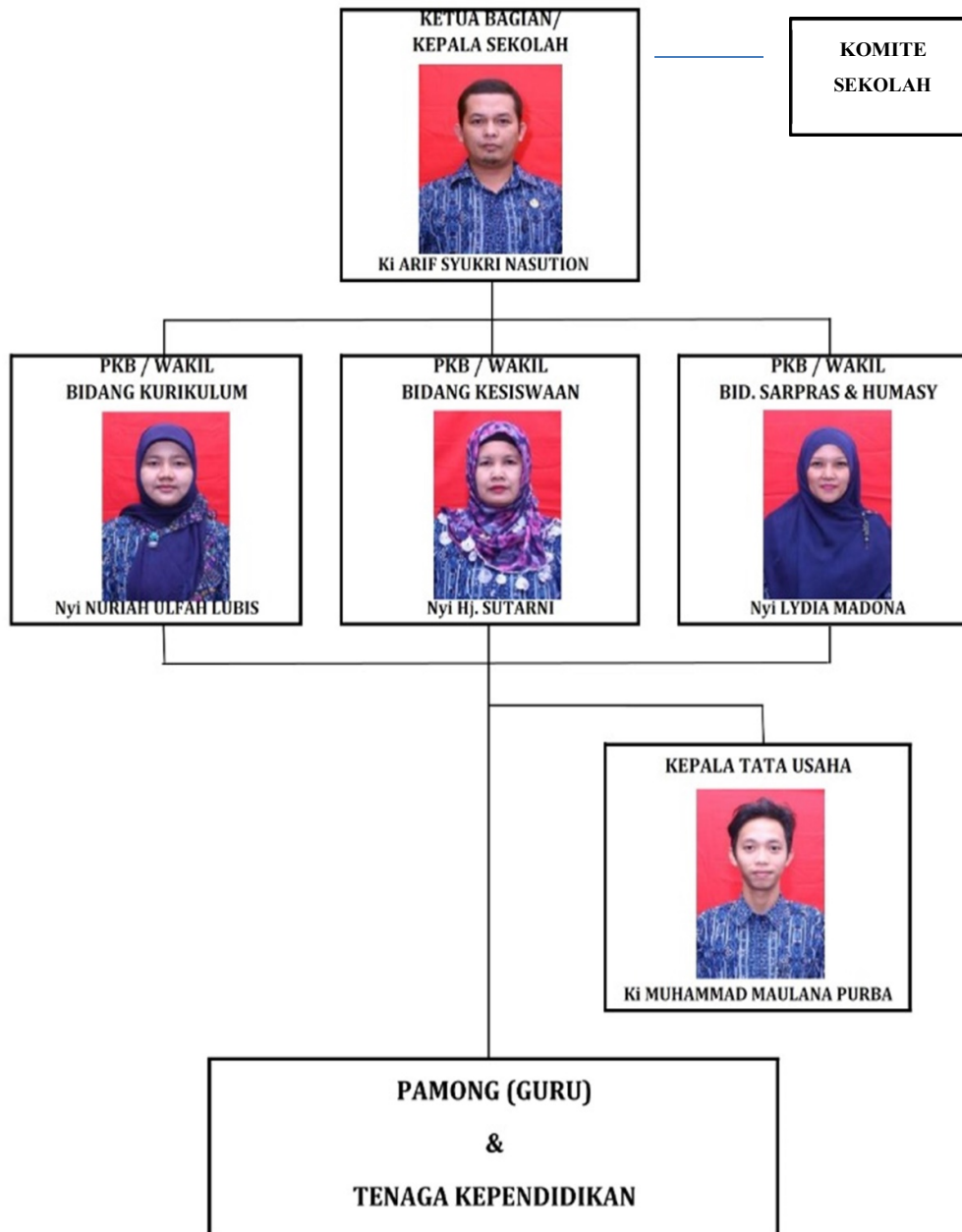
3. Meningkatkan komitmen seluruh warga sekolah terhadap tugas pokok dan fungsinya.
4. Mengembangkan peran teknologi informatika dalam pembelajaran dan administrasi sekolah.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan dan sumber daya manusianya dalam upaya peningkatan mutu.
6. Menyelaraskan kodrat alam warga sekolah sebagai makhluk yang berketuhanan sehingga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pekerti luhur.

3. Struktur Organisasi SMA Swasta Tamansiswa Cabang Pematangsiantar

Keberadaan struktur organisasi dalam lembaga pendidikan sangat diperlukan. Hal ini disebabkan karena keberadaan struktur sangat berpengaruh terhadap kualitas lembaga pendidikan. Dengan adanya struktur organisasi tersebut hubungan masing-masing bagian atau personal akan menjadi lebih jelas, baik antara atasan dan bawahan atau sesama bawahan. Sehingga program yang telah ditentukan dapat tercapai secara optimal. Struktur organisasi merupakan suatu komponen yang membawahi satu komponen lain, ada yang membawahi lebih dari satu komponen supaya program dapat terkoordinasi dengan baik.

**STRUKTUR ORGANISASI
TAMAN MADYA (SMA) TAMANSISWA PEMATANGSIANTAR
TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021**

(Sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019)



4. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru merupakan komponen penting sekolah yang turut menentukan perkembangan dan kemajuan sekolah khususnya dalam mencerdaskan anak bangsa. Guru yang mempunyai tugas untuk mencerdaskan anak bangsa ini, menjadikan anak didik menjadi dewasa, mandiri, kreatif, dan berbudi luhur sesuai dengan nilai-nilai moral yang positif. Maka dari itu guru dituntut untuk dapat mempraktekkan hal-hal yang bersifat positif tersebut kepada anak didik, agar anak didik juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan cara demikian pola pikir anak didik, dan karakter anak didik dapat terbentuk.

Table 4.1

**DAFTAR GURU DAN STAF PEGAWAI
SMA TAMANSISWA PEMATANGSIANTAR**

NAMA	JABATAN/MENGAJAR
Ki Arif Sukri Nasution, S.Pd	Kepala Sekolah
Nyi Sutarni, S.Pd	Biologi/Ketamansiswaan
Nyi Lydia Madona, S.Pd	Ekonomi
Nyi Nuriah Ulfah Lubis, M.Pd	Bahasa Indonesia
Nyi Asnah Siahaan, S.Pd	Pendidikan Jasmani
Ki Ari Afandi, S.Pd	Sejarah/Geografi
Ki Bakhtiar Candra, S.Pd	Seni Budaya
Nyi Dewi Patria Nasution, S.Pd	Matematika
Nyi Elfi Frida Marpaung, S.Pd	Sosiologi
Nyi Elvira Handayani, S.Pd	Biologi

NAMA	JABATAN/MENGAJAR
Nyi Frank Ending Sari, S.Pd	Geografi
Ki Fransiscus Josep Manurung, S.Pd	Ekonomi
Nyi Heriana, S.Pd	Sejarah
Nyi Lesriana Sidabutar, S.Pd	Bahasa Inggris
Nyi Megaria Damanik, S.Pd	Bahasa Jerman
Nyi Mismah Sofayaty Saragih, S.Pd	Kimia
Nyi Messi Anggraini, S.Pd	Fisika
Ki Muhammad Fahmi Nasution, ST	Matematika
Ki Muhammad Ridhwan al Islamy, S.Pd I	Pendidikan Agama Islam
Nyi Neliana Sari, S.Pd	Bahasa Inggris
Nyi Nurhayati Saragih, S.Pd	Kimia
Nyi rita Eliyawati Br, Sinaga, S.Pd	Biologi
Nyi Roito Analisa Sitingjak, S.Kom	TIK
Ki Rudi simanjuntak, S.Pd	BK
Nyi Agnes Banjarnahor, S.Pd	Bahasa Jerman
Nyi Rukayah Noprilan Siagian, S.Pd	Matematika
Nyi Sri Laila Ramadhani, S.Pd	Matematika
Nyi suyeni, S.Pd	BK
Nyi Utari Eka Putri, S.Pd	Bahasa Indonesia
Ki Muhammad Maulana Purba	Tata Usaha
Ki Egi Prayoga	Tata Usaha
Nyi Sri Hanum	UKS
Ki Muhammad Affan Nasution	Satpam

5. Keadaan Siswa SMA Tamansiswa Pematangsiantar

Siswa adalah peserta didik yang ada dalam proses belajar mengajar di dalam kelas yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan dan mentransfer ilmu. Siswa yang menjadi objek utama dalam proses belajar mengajar merupakan sosok pribadi yang menerima program pendidikan dan latihan-latihan yang ada di SMA Tamansiswa Pematangsiantar, maksudnya setiap siswa yang mendapatkan pendidikan dan latihan-latihan kesehariannya dapat merubah sikap dan tingkah lakunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga kelak menjadi pribadi yang dipandang oleh masyarakat yaitu pribadi yang memiliki nilai tambah bagi kehidupan yang akandatang.

Tabel 4.2

Keadaan Siswa SMA Tamansiswa Pematangsiantar

No	Tahun Pelajaran	Kelas	IPA	IPS	Jumlah
1.	2018/2019	X	211	142	353
		XI	200	100	300
		XII	190	103	293
2.	2019/2020	X	209	135	344
		XI	197	98	295
		XII	190	103	293
3.	2020/2021	X	198	160	358
		XI	210	128	338
		XII	190	94	284

Berikut daftar siswa SNMPTN SMA Tamansiswa Pematangsiantar di uraikan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Data Siswa SNMPTN SMA Tamansiswa Pematangsiantar

No.	Tahun Pelajaran	IPA	IPS	Jumlah
1.	2017/2018	12	3	15
2.	2018/2019	4	3	7
3.	2019/2020	6	4	10

Dari data diatas dapat diketahui bahwa terjadinya penurunan siswa SMA Tamansiswa Pematangsiantar yang lulus dalam seleksi SNMPTN.

6. Fasilitas Sekolah sebagai Sarana Pembelajaran

Sarana dan Prasarana yang dimiliki sekolah untuk dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran sebagai berikut.

Tabel 4.4
Keadaan Sarana dan Prasarana SMA Tamansiswa Pematangsiantar

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1.	Ruang Kantor Kepala Sekolah	1	Baik
2.	Ruang Kantor Guru	1	Baik
3.	Ruang BK	1	Baik
4.	Ruang Kelas	25	Baik
5.	Perpustakaan	1	Baik
6.	Laboratorium IPA	1	Baik

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
7.	Laboratorium Komputer	1	Baik
8.	Ruang UKS	1	Baik
9.	Lapangan Olahraga	2	Baik
10.	Lapangan Upacara	1	Baik
11.	Musholla	1	Baik
12.	Kamar Mandi Guru	1	Baik
13.	Kamar Mandi Siswa	6	Baik
14.	Kantin	1	Baik

4.2. Temuan Khusus Penelitian

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Hal yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan, keanggotaannya serta pemilihan dan pembentukan kepengurusan.

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002), Badan ini bersifat mandiri, tidak memiliki hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah merupakan penyempurnaan dan perluasan badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah

dengan masyarakat. Sampai tahun 1994 mitra sekolah hanya terbatas dengan orang tua peserta didik dalam wadah yang disebut dengan POMG (Persatuan Orang Tua dan Guru), tahun 1994 sampai pertengahan 2002 dengan perluasan peran menjadi BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) yang personilnya terdiri atas orang tua dan masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan yang tidak hanya di sekitar sekolah.

Keanggotaan dalam komite sekolah di SMA Tamansiswa Kota Pematangsiantar terdiri atas tokoh masyarakat, orang tua siswa, guru, tenaga kependidikan, pakar pendidikan dan anggota masyarakat yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan, unsur pemerintah setempat, perwakilan siswa, perwakilan forum alumni.

Selanjutnya peningkatan mutu layanan pendidikan di SMA Tamansiswa Kota Pematangsiantar merupakan perwujudan dari kemampuan sumber daya sekolah dalam mentransformasikan berbagai potensi yang dimiliki sekolah untuk mencapai nilai tambah bagi peserta didik dan masyarakat. Dalam merealisasikan sumber daya dan potensi sekolah menjadi wujud nyata layanan pendidikan diperlukan acuan operasional sebagai kerangka kerja bagi pengelola satuan pendidikan. Langkah lain yang diperlukan dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah adanya kemandirian segenap komponen sekolah untuk melakukan evaluasi diri (*self-assessment*), sehingga perkembangan mutu layanan pendidikan dapat diketahui. Analisis tersebut seperti pada pemenuhan kualitas SDM, tenaga pendidik dan kependidikan, dan kualitas kepemimpinan dan pengelolaan sekolah.

Dalam penelitian ini, temuan penelitian berdasarkan hasil analisis peran dan keterlibatan komite sekolah berdasarkan penelusuran wawancara dan observasi di lapangan menemukan 4 (empat) temuan tentang peran dan keterlibatan komite sekolah meliputi, (1) pemberi pertimbangan, (2) sebagai pendukung, (3) sebagai kontroling, (4) sebagai mediator.

1. Komite Sekolah Sebagai Pertimbangan

Komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan terhadap sekolah memiliki arti, bahwa komite sekolah dipandang mitra kerja kepala sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah. Melalui komite sekolah, orang tua dan masyarakat dapat ikut serta, merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah. Selama ini keberadaan komite sekolah sangat berarti sekali bagi setiap satuan pendidikan. Karena komite sekolah merupakan pembantu utama satuan dalam memakmurkan lembaga pendidikan selain masyarakat internal sekolah. Segala macam program yang akan dilaksanakan sekolah sebaiknya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite sekolah. Sebab, segala macam kebijakan yang akan diterapkan ataupun yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat internal maupun eksternal sekolah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara dengan Ki Arief Syukri selaku Kepala SMA Tamansiswa Kota Pematangsiantar menyatakan bahwa:

Komite sekolah memberikan pertimbangan khusus dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, misalnya dalam hal penetapan penerimaan

siswa baru, kenaikan uang sekolah dan rencana program-program sekolah, yakni sebelum sekolah mengambil keputusan maka sekolah mengundang komite sekolah untuk mendiskusikan dan menetapkan antara pihak sekolah dengan komite sekolah. (Wawancara, 20 Februari 2021)

Hal senada juga diungkap oleh Nyi Nuriah Ulfa selaku Wakil Kepala

Bidang Kurikulum menjelaskan sebagai berikut:

Komite sekolah sebagai mitra kerja sekolah dapat memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan program kerja sekolah serta program-program yang dilaksanakan sekolah, misalnya sekolah akan rencana program sekolah, rencana kenaikan biaya pendidikan dan pembangunan sarana serta prasarana sekolah..pihak sekolah terlebih dahulu mengkonsultasikan masalah itu melalui rapat antara sekolah dan komite sekolah agar dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah. (Wawancara, 20 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara di atas tersebut, posisi komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan masih berlanjut pada pemberian pada pemberian masukan dan pertimbangan dalam hal rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan, kriteria tenaga kependidikan, dan kriteria fasilitas pendidikan. Sebagaimana yang peneliti temukan dilapangan melalui wawancara dengan anggota komite sekolah SMA Tamansiswa Kota Pematangsiantar Bapak M. Irvan yang menyatakan bahwa:

Kami selaku komite sekolah sangat dilibatkan oleh pihak sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan...keterlibatan kami sebagai komite sekolah mulai dari pemberian masukan dan pertimbangan dalam menetapkan dana BOS, masukan dalam melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah dan mempromosikan sekolah kepada masyarakat selain itu dalam kegiatan-kegiatan sekolah kami selalu diundang dan dilibatkan dalam pelaksanaannya, termasuk dalam rapat penerimaan siswa baru. (Wawancara, 22 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara di atas, dalam penyelenggaraan pendidikan,

komite sekolah sangat berperan dalam memajukan sekolah antara lain peran dan keterlibatannya dalam perencanaan BOS, perencanaan program pendidikan dan pengajaran, dan mempublikasikan serta mempromosikan sekolah kepada berbagai potensi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Fungsi ini akan dapat berguna dalam memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Hal senada diungkapkan juga oleh Bapak Juli Wardani, selaku Ketua Komite sekolah menyebutkan bahwa:

Di sekolah, posisi kami sebagai komite sekolah pemberi pertimbangan dan saran terkhusus dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan dana Bantuan Sekolah (BOS), pertimbangan kenaikan uang sekolah, biaya pendidikan lainnya serta penyusunan kriteria kinerja satuan, kriteria tenaga kependidikan, dan kriteria fasilitas pendidikan. (Wawancara, 23 Februari 2021)

Berdasarkan pernyataan di atas bawasanya dalam meningkatkan mutu pendidikan komite sekolah ikut serta dalam keterlibatannya untuk memberikan pertimbangan dalam pengelolaan BOS, sarana prasarana, dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran serta kegiatan-kegiatan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Komite sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh komite sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta

dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Agar komite

sekolah dapat berdaya, maka dalam pembentukan pengurus pun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang benar, serta dapat dikelola secara benar pula.

Komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Juli Wardani selaku ketua komite sekolah yang juga wali murid kelas XI, beliau menyatakan bahwa:

Mekanisme pembentukan komite sekolah di SMA Tamansiswa Kota Pematangsiantar ini terlebih dahulu kita diundang oleh sekolah kemudian sekolah bersama-sama masyarakat yang diundang diantaranya yaitu: tokoh masyarakat sekitar, wali murid-wali murid yang dianggap berpotensi, unsur guru, lalu kita mengadakan rapat/musyawarah, kemudian diadakan pemilihan. (Wawancara, 23 Februari 2021)

Hal senada diungkapkan oleh Bapak M. Irvan selaku sekretaris komite sekolah di SMA Tamansiswa Kota Pematangsiantar yang juga wali murid kelas X, sebagai berikut:

Mekanisme pemilihan/pembentukan anggota dan pengurus komite sekolah di SMA Tamansiswa Kota Pematangsiantar ini dilakukan secara musyawarah, untuk pemilihannya biasanya dilakukan 4 tahun sekali. Pada waktu pemilihan, sekolah mengundang wali murid yang puteranya masih

dikelas X jadi baru masuk. Dan ada juga sebagaian wali murid yang lama supaya tidak terputus hubungannya. Disana ada aturannya dari wali murid murni dan ada wali murid yang sekaligus menjabat sebagai guru disini, alumni dan steakholder. Jadi orang-orang yang berperan di sekitar kita yang mendukung, kita undang beberapa orang itu kemudian dari orang-orang yang hadir itu kita mengadakan musyawarah, kemudian kita pemilihan. Sebelumnya kita undang beberapa orang calon, dari yang datang kita musyawarakan apa yang di inginkan secarapemilhannyasetelah itu kita adakan pemilihannya, dan ada pernyataan kesanggupan.” (Wawancara, 22 Februari 2021)

Lebih lanjut dikemukakan pula oleh Nyi Lidia Madona, selaku bendahara komite sekolah SMA Tamansiswa Kota Pematangsiantar, sebagai berikut:

Adapun mekanisme pembentukan komite sekolah di sekolah ini, pertamanya kita memilih wali siswa yang diharapkan peduli dengan kondisi sekolah. Jadi wali siswa yang setidaknya dia itu mengetahui, bukan wali siswa yang awam sekali. Dan diharapkan sesekali punya waktu untuk datang ke sekolah. Kemudian mereka diundang dan pada saat itu diadakan pemilihankomitesekolahsecaravoting.”(Wawancara,24Februari2021)

Sebagaimana pernyataan di atas, SMA Tamansiswa Kota Pematangsiantar telah melaksanakan pembentukan/pemilihan anggota dan pengurus komite sekolah yang mengacu pada tata cara pembentukan yang demokratis, seperti yang tertulis dalam Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan dan Kebudayaan tentang prinsip pembentukan komite sekolah, yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan demokratis, serta merupakan mitra satuan pendidikan. Wawancara dengan Ki Rudi Simanjuntak selaku perwakilan guru sekaligus sebagai anggota komite sekolah menyatakan bahwa:

Peningkatan mutu layanan pendidikan sangatlah penting dilakukan oleh lembaga sekolah, karena dengan layanan pendidikan yang baik maka output siswa yang dihasilkan akan baik juga, selanjutnya cara yang komite sekolah lakukan dalam memberikan pertimbangan guna meningkatkan layanan mutu pendidikan di SMA Tamansiswa ialah dengan mengadakan musyawarah antar anggota komite sekolahdengan pihak sekolah. (Wawancara, 24 Februari2021)

Pernyataan di atas juga didukung oleh Bapak Juli Wardani selaku Ketua

Komite Sekolah menyatakan bahwa :

Pemberian pertimbangan yang saya lakukan sebagai anggota komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu layanan pendidikan ialah memberikan masukan dan ide gagasan bersama yang kemudian dibahas dalam rapat-rapat antar anggota komite sekolah yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. (Wawancara, 23 Februari 2021)

Demikian juga menurut Nyi Lidia Madona, selaku bendahara komite sekolah yang menyatakan bahwa:

Pemberian pertimbangan di sekolah sebagai anggota komite sekolah yang saya lakukan adalah memberikan masukan terkait persoalan yang terjadi di sekolah. Hal ini biasanya terjadi ketika ada rapat tentang komite sekolah, pemberian pertimbangan yang saya lakukan biasanya sesuai dengan saran dan permintaan wali murid terkait dengan sekolah tersebut. Biasanya pemberian pertimbangan ini terkait dalam masalah peningkatan mutu layanan pendidikan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana, misalnya pengadaan peralatan laboratorium, buku-buku serta rencana pembangunan laboratorium dan lain-lain. (Wawancara, 24 Februari 2021)

Dalam perannya sebagai pertimbangan juga Ki Arif Sukri sebagai kepala sekolah menyatakan:

Pemberian pertimbangan oleh komite sekolah dilakukan ialah dengan menjadwalkan rapat antar anggota komite sekolah dan memberikan ulasan ulasan terkait kemajuan sekolah yang harus diketahui oleh pihak wali murid, pemberian pertimbangan ini biasanya terlaksana sebelum program dari sekolah terealisasi, misalnya dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan, kami pihak sekolah sebelumnya telah mempunyai rencana program kerja kedepannya yang akan dilaksanakan, dan sebelum hal ini terjadi, maka kami pihak sekolah mengadakan musyawarah bersama anggota komite sekolah. (Wawancara, 20 Februari 2021)

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran

sesuai posisi dan otonomi yang ada. Berdasarkan temuan di atas, peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan atau nasehat, adalah kemampuan komite sekolah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan di satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan informasi dan rekomendasi kepada satuan pendidikan supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Adapun indikator kinerja dari peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan adalah kebijakan pendidikan, program pendidikan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan, kriteria tenaga kependidikan, dan kriteria fasilitas kependidikan.

2. Komite Sekolah Sebagai Pendukung

Komite sekolah sebagai pendukung adalah bentuk dukungan komite sekolah baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Adapun indikator kinerja dari peran komite sekolah sebagai pendukung adalah mendorong orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan, mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Komite sekolah sebagai *supporting agency* atau pendukung kegiatan sekolah maksudnya anggota komite sekolah ikut turut aktif dalam kelancaran

kegiatan musyawrah pendidikan yang berkaitan dengan layanan pendidikan. Hasil observasi yang penulis lakukan terkait dengan komite sekolah sebagai pendukung layanan pendidikan dapat dinilai baik, hal ini terlihat dari dukungan masyarakat terhadap kegiatan sekolah yang diselenggarakan, terbukti dengan beberapamasukandan saran para anggota komite sekolah yang telah didokumentasikan di dalam notulen rapat.

Selanjutnya hasil wawancara bersama Bapak Juli Wardani selaku Ketua Komite Sekolah menyatakan bahwa:

Dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan, saya sebagai ketua komite sekolah berupaya menjalankan tugas komite sekolah, kemudian terkait dengan partisipasi dalam mendukung layanan pendidikan yang komite sekolah lakukan adalah dengan ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang telah disusun oleh pihak sekolah, karena dari pihak sekolah ketika hendak melakukan sebuah program kami pihak komite sekolah selalu diberi undangan untuk ikut dalam musyawarah pelaksanaan program yang hendak dilaksanakan. (Wawancara, 23 Februari2021)

Demikian juga menurut Ki Rudi Simanjuntak sebagai guru juga sebagai anggota komite sekolah menyatakan:

Partisipasi dalam mendukung layanan pendidikan yang kami lakukan ialah dengan turut hadir dalam rapat-rapat yang diselenggarakan pihak sekolah untuk membahas kegiatan kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan dan memberikan respon yang positif terhadap program-program sekolah. (Wawancara, 24 Februari2021)

Hal senada juga diungkap Ibu Lidia Madona, selaku bendahara komite sekolah yang menyatakan bahwa :

Pertisipasi yang kami lakukan sebagai anggota komite sekolah ialah memberikan masukan dan saran dalam melakukan musyawarah terkait dengan program sekolah yang berkaitan dengan layanan pendidikan dan mengapresiasi keiatan-kegiatan pendidikan yang diprogramkan sekolah, seperti bimbel, dan ekstrakurikuler lainnya. (Wawancara, 24 Februari 2021)

Dalam kaitannya peran komite sekolah sebagai pertimbangan bagi sekolah, juga disampaikan oleh Ki Arif Syukriselaku Kepala

Sekolah menyatakan bahwa:

Pertisipasi dukungan layanan pendidikan yang komite sekolah lakukan adalah untuk peningkatan mutu layanan pendidikan, dengan memberikan support dan respon yang positif setiap kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, dan memberikan sumbangsih pemikiran berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang sekolah lakukan, seperti kegiatan pelaksanaan hari-hari besar nasional, kegiatan ekstrakurikuler dan bimbel-bimbel lainnya. (Wawancara, 21 Februari 2021)

Hal senada juga disampaikan oleh Nyi Rita Sinaga selaku guru SMA

Tamansiswa menyebutkan bahwa:

Partisipasi komite sekolah dalam mendukung layanan pendidikan di SMA Tamansiswa sangat tinggi, mendukung dan mensupport program-program kegiatan pendidikan, seperti ekstrakurikuler, program bimbel bagi siswa, program les sekolah bagi siswa dan lain-lain. (Wawancara, 25 Februari 2021)

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa peran komite sekolah juga mempunyai peranan dalam pendidikan yaitu menjadi fasilitator dalam menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, ikut serta dalam menyelenggarakan pendidikan swasta, membantu pengadaan tenaga, saran dan prasarana serta membantu mengembangkan profesi baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, kepala sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan tersebut sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien. Tugas komite sekolah menganut model kemitraan yaitu koordinator dan

fasilitator. Oleh karena itu, kontribusi komite sekolah sangat dominan bagi tercapainya tujuan pendidikan, karena dapat menawarkan pendidikan yang lebih baik dengan menjadikan sekolah unggulan dan berorientasi budayadaerah.

3. Komite Sekolah Sebagai Kontrol

Komite sekolah sebagai pengontrol layanan pendidikan maksudnya komite sebagai lembaga yang didirikan merupakan pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan mempunyai tugas sebagai pengontrol kegiatan yang dilakukan dalam sebuah pendidikan di sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terkait komite sekolah sebagai pengontrol kegiatan layanan pendidikan dapat penulis katakan sudah baik, hal ini terlihat beberapa komite sekolah telah memberikan masukannya terkait tentang sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti fasilitas umum, pengecekan tentang pekerjaan sekolah dan lain-lain.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Juli Wardani selaku Ketua Komite Sekolah menyatakan bahwa:

Partisipasi kami sebagai komite sekolah adalah dalam upaya mengontrol layanan pendidikan dengan melakukan pengecekan terkait program yang sedang dan telah dilaksanakan di sekolah, biasanya pengontrolan ini terkait tentang pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang sedang berlangsung, komite sekolah juga bertindak dalam mengontrol dan mengawas dalam hal keuangan bantuan sekolah (BOS) dan bagaimana proses jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah, setidaknya komite sekolah mengontrol keuangan dalam setiap semester atau akhir tahun pelajaran. (Wawancara, 23 Februari 2021)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ki Rudi Simanjuntak selaku guru juga sebagai anggota komite sekolah menyatakan:

Partisipasi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan terkait dengan

kontroling kegiatan layanan pendidikan yang dilakukan ialah dengan memberikan pengawasan terhadap program kerja yang sedang berlangsung, menanyakan kekurangan kepada pihak pekerja yang sedang melakukan kerja diwilayah sekolah, dan memberikan arahan terkait dengan projek yang hendak dicapai. (Wawancara, 24 Februari2021)

Demikian halnya Nyi Lidia Madona, selaku bendahara komite sekolah yang menyatakan bahwa:

Partisipasi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan terkait kontrol kegiatan layanan pendidikan yang saya lakukan ialah dengan melakukan pengecekan kerja tukang, melakukan pengecekan keuangan, menanyakan pengeluaran barang, dan turut andil dalam proses kegiatan pelaksanaan program kerja sekolah. (Wawancara, 24 Februari2021)

Peran komite sekolah sebagai pengontrol lebih lanjut disampaikan Nyi Rukayah selaku guru menyatakan:

Upaya peningkatan mutu layanan pendidikan yang dilakukan sekolah ialah bekerjasama dengan komite sekolah. Dimana komite sekolah melakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait sekolah. (Wawancara, 26 Februari 2021)

Demikian juga menurut Ki Arif Syukri sebagai kepala SMA Tamansiswa menyatakan bahwa :

Kontrol kegiatan layanan pendidikan yang dilakukan komite sekolah ialah dengan mengecek barang-barang kerja, mengecek fasilitas sekolah, seperti kotak sampah, kamar mandi, laboratorium, kebersihan mushola dan tempat umum, melakukan pengawasan terkait kinerja guru, memberikan masukan terkait keterampilan mengajar guru, dan mengikut sertakan guru dalam pelatihan-pelatihan. (Wawancara, 20 Februari 2021)

Dalam era otonomi sekolah sekarang ini ruang gerak dari para guru dan kepala sekolah lebih luas termasuk dalam mengelola anggaran pendidikan di sekolah. Dengan adanya keleluasaan gerak kepala sekolah mengelola anggaran tersebut menyebabkan peranan komite sekolah menjadi besar, sebab keputusan

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan selalu melibatkan semua pihak. Peranan komite sebagai pengontrol dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar dimana komite sekolah sudah menjalankan perannya, selain itu juga sekolah bersama-sama dengan komite sekolah melaksanakan evaluasi dan kontroling secara bersama dalam pencapaian tujuan dan sasaran programsekolah.

4. Komite Sekolah Sebagai Mediator

Komite sekolah sebagai mediator maksudnya komite sekolah mempunyai tugas sebagai penghubung antara pihak masyarakat dan sekolah terkait masukan-masukan yang membangun bagi sekolah. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terkait dengan komite sekolah sebagai mediator dapat penulis jelaskan bahwa komite sekolah telah melakukan tugasnya sebagai mediator antara masyarakat dan pihak sekolah, hal ini terlihat dari beberapa saran yang telah di sampaikan oleh pihak komite sekolah terhadap sekolah, dan hal ini tertlis dalam buku saransekolah.

Selanjutnya hasil wawancara Bapak Juli Wardani selaku Ketua Komite Sekolah menyatakan bahwa:

Dalam upaya menghubungkan atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, kami melakukannya dengan mengkomunikasikan kepada pihak wali murid tentang apa keluhan dan masukan yang hendak di sampaikan kepada pihak sekolah, kemudian saya menyampaikannya dalam rapat anggota komite sekolah. (Wawancara, 23 Februari 2021)

Hal senada juga disampaikan Bapak M. Irvan selaku sekretaris komite sekolah menyatakan:

Partisipasi yang saya lakukan dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan pemerintah atau pihak sekolah ialah dengan menyampaikan beberapa pendapat dari masyarakat yang kemudian saya sampaikan dengan pihak sekolah. (Wawancara, 22 Februari 2021)

Demikian menurut Nyi Lidia Madona, selaku bendahara komite sekolah yang menyatakan bahwamenyatakan:

Komunikasi antar masyarakat dan sekolah sangatlah penting demi hasil pendidikan yang bermutu, karena pada dasarnya orangtua/wali murid juga merupakan salah satu faktor pendorong siswa dalam melakukan pembelajarannya, untuk itu saya sebagai anggota komite sekolah selalumenjalin komunikasi kepada wali murid terkait perkembangan dan keluhan yang dialami oleh siswa yang kemudian hal itu akan menjadi masukan dan tolak ukur pihak sekolah dalam menerapkan proses pembelajaran dan pelayanan dalam pendidikan. (Wawancara, 24 Februari 2021)

Demikian pula wawancara dengan Nyi Rukayah selaku guru di SMA Tamansiswa Pematangsiantar menyatakan:

Partisipasi komite sekolah dalam penghubung antara pihak wali murid dengan sekolah ialah dengan melakukan diskusi dan musyawarah terkait masukan-masukan yang hendak disampaikan oleh pihak wali murid kepada sekolah. (Wawancara, 26 Februari 2021)

Hal senada juga disampaikan oleh Ki Arif Sukri selaku Kepala Sekolah SMA Tamansiswa Pematangsiantar menyatakan bahwa:

Partisipasi yang dilakukan komite sekolah sebagai penghubung sekolah dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu layanan pendidikan ialah memberikan kesempatan para wali murid untuk ikut turu serta dalam pengembangan sekolah, dengan cara mengundang pihak wali murid dalam acara rapat dewan guru. (Wawancara, 20 Februari 2021)

Berdasarkan uraian di atas, keberadaan dan peran dari komite sekolah juga menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Berdasarkan temuan di lapangan, untuk menjalankan perannya komite

sekolah juga berfungsi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu disekolah.
2. Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat baik perorangan maupun kelompok dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan

Selain itu juga, komite sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut:

1. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
2. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga dan pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Komite sekolah dibentuk untuk desentralisasi dan diharapkan bekerja sama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Selain peran yang disebutkan di atas, peran nyata yang dilaksanakan

komite sekolah adalah sebagai mitra atau partner bagi pemerintah daerah maupun sekolah. Badan ini memiliki peran sebatas memberikan pertimbangan atau pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan sekolah, serta memberikan dukungan, kontrol, dan menjembatani kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan. Peran komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Di samping itu juga berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi, memberi masukan, mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana dari masyarakat dan melakukan evaluasi. Maka dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, orang tua dan masyarakat mempunyai potensi yang signifikan dalam berperan aktif. Antara lain orang tua turut belajar kaitannya dengan birokrasi kependidikan skala kecil dalam satuan pendidikan (sekolah), mendorong aktif kegiatan di sekolah, menciptakan situasi keakraban yaitu dengan diskusi di rumah, dan juga orang tua perlu mengetahui perkembangan anaknya di sekolah serta turut serta dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajarmengajar.

B. Pembahasan

Komite sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional. Amanat rakyat ini

selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luarsekolah.

Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*Community-based participation*) dan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*). Kepala sekolah, guru, dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkatan mikro harus dihasilkan dari interaksi ketiga pihak tersebut. Masyarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah, karena mereka adalah pembayar pendidikan melalui pembayaran pajak, sehingga sekolah-sekolah harus bertanggungjawab terhadap masyarakat.

Komite sekolah hendaknya merepresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat. Interaksi antara masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah dengan komite sekolah. Dengan demikian, komite sekolah merupakan badan yang mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan

mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Disamping itu, komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Berdasarkan temuan penelitian baik yang didapat dari hasil observasi, dokumentasi maupun interview tentang bagaimana gambaran secara umum mengenai peran komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar maka dapat dibahas temuan penelitian inidiantaranya:

1. Komite sebagai Advisory agency (pemberipertimbangan)

Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam mutu layanan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting. Dikarenakan pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan berakitan sebagai pemberi pertimbangan dapat dilakukan melalui program kerja bersama atau melakukan musyawarah bersama yang telah

dijadwalkan oleh pihak sekolah guna membahas program kerja sekolah kedepannya.

Sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan indikator kinerjanya dengan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai: (1) Kebijakan pendidikan; (2) Program Pendidikan; (3) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS); (4) Kriteria kinerja satuan; (5) Kriteria tenaga kependidikan; (6) Kriteria fasilitas pendidikan.

2. Komite sebagai Supporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan)

Peran komite sekolah sebagai pendukung layanan kegiatan pendidikan dimaksudkan untuk mendukung sepenuhnya program sekolah yang nantinya akan berdampak pada output lulusan siswa yang sesuai dengan harapan visi misi sekolah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas peningkatan mutu layanan pendidikan yang dilakukan komite sekolah terkait dengan mendukung layanan pendidikan dapat dilakukan dengan cara memberikan sumbangsih pemikiran dan turut andil dalam proses musyawarah yang dilakukan oleh pihak sekolah dan memberikan dukungan terhadap setiap kegiatan yang bernilai positif.

Sebagai pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, indikator kinerjanya yaitu: (1) Mendorong orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan; (2) Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan; (3) Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan; (4) Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu; (5) Mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

3. Komite sekolah sebagai Controlling agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan).

Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan sebagai pengontrol layanan pendidikan ialah turut serta dalam kegiatan dan turut serta dalam mengawasi kemajuan dan program kerja yang dibuat oleh sekolah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas peningkatan mutu layanan pendidikan yang dilakukan komite sekolah terkait dengan pengontrol kegiatan layanan pendidikan dapat dilakukan dengan cara memberikan pengawasan kerja sekolah, turut serta mengecek keuangan sekolah dan memberikan pengawasan terhadap sarana dan prasarana sekolah.

Sebagai pengontrol (controlling agency), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, indikator kinerjanya yaitu: (1) Melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan; (2) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program penyelenggaraan pendidikan; (3) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program keluaran pendidikan.

4. Komite sekolah sebagai Mediator

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas peningkatan mutu layanan pendidikan yang dilakukan komite sekolah terkait dengan penghubung atau pengait tali komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat

dilakukan dengan cara menyampaikan aspirasi-aspirasi wali murid, menyampaikan keluhan-keluhan wali murid dan menyampaikan saran-saran yang disampaikan wali murid kepada pihak sekolah. Sebagai mediator, dengan masyarakat di satuan pendidikan, indikator kinerjanya yaitu: (1) Melakukan kerja sama dengan masyarakat; (2) Menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (3) Menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Komite sekolah memiliki peran dalam memberikan pertimbangan atau pilihan-pilihan kepada sekolah, serta memberikan dukungan, kontrol, dan menjembatani kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan. Peran komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu juga berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisis aspirasi, memberi masukan, mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana dari masyarakat dan melakukan evaluasi. Menurut Hasbullah (2007:34) menjelaskan komite sekolah sebagai lembaga mandiri dan mitra dari sekolah dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

- b. Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: 1) kebijakan dan program pendidikan, 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), 3) kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, 4) kriteria fasilitas pendidikan; dan 5) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa komite sekolah berfungsi meyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang

berkualitas di satuan pendidikan. Mulyasa (2011:64) menjelaskan posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara wali murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dan sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Sagala (2007:45) keberadaan komite sekolah menjembatani kepentingan keduanya. Hasbullah (2007:47) salah satu indikator kinerja komite sekolah yaitu memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS), memberikan pertimbangan perubahan dan ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah. Memberdayakan dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan salah satu alternatif dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Keterlibatan komite sekolah dapat diawali dari penyusunan RAPBS. Keterlibatan komite sekolah mulai dari proses awal ini memungkinkan komite sekolah melakukan kontrol. Hal ini penting untuk menghindari penyelewengan dan memenuhi aspek transparansi dalam pengelolaan pendidikan dan dan pendidikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan yang telah diuraikan pada analisis data penelitian tentang peran dan keterlibatan Komite Sekolah di SMA Tamansiswa Pematangsiantar dapat disimpulkan bahwa Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dilakukan dengan beberapa peran komite sekolah diantaranya:

1. Komite Sekolah sebagai pemberipertimbangan (*advisory agency*) telah melaksanakan perannya dengan cara bekerja sama dengan pihak sekolah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan dengan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai (1) kebijakan pendidikan; (2) program pendidikan; (3) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS); (4) kinerja-kinerja satuan pendidikan; (5) kriteria tenaga kependidikan; (6) kriteria fasilitas pendidikan.
2. Komite Sekolah sebagai pendukung kegiatan layanan pendidikan (*supporting agency*) telah melaksanakan perannya dengan cara memberikan sumbangan pemikiran dan turut andil dalam proses musyawarah yang dilakukan oleh pihak sekolah dan memberikan dukungan terhadap kegiatan yang bernilai positif. Hal ini diharapkan dapat berdampak pada output lulusan siswa yang sesuai dengan harapan visi dan misi sekolah.

3. Komite sekolah sebagai pengontrol kegiatan layanan pendidikan (*controlling agency*) telah melaksanakan perannya dengan cara turut serta dalam kegiatan dan mengawasi kemajuan dan program kerja yang dibuat oleh sekolah. Hal ini terkait dengan memberikan pengawasan program kerja sekolah, serta turut serta mengecek keuangan sekolah dan memberikan pengawasan terhadap sarana dan prasarana sekolah.
4. Komite Sekolah sebagai penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah (*mediator*) telah melakukan perannya dengan cara menyampaikan aspirasi-aspirasi wali murid, menyampaikan keluhan-keluhan wali murid dan menyampaikan saran-saran yang disampaikan wali murid kepada pihak sekolah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dengan rendah hati menyampaikan beberapa saran yang semoga saja dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang berkenaan dengan peran dan fungsi komite madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah aliyah di kecamatan Wedarijaksa. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak sekolah

Sekolah dalam menjalankan proses pendidikan tidak dapat berdiri sendiri. Dalam pengelolaan pendidikan di sekolah, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk komite sekolah. Keberadaan komite sekolah memiliki peran penting dalam manajemen

berbasis sekolah, yaitu sebagai mitra dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Pihak sekolah hendaknya memberi kesempatan yang luas kepada komite sekolah untuk melaksanakan perannya secara optimal. Kerja sama yang baik antara pihak sekolah dengan komite sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah diharapkan dapat berjalan lebih maksimal.

2. Bagi kepala sekolah

Kepala Sekolah memiliki peran dan tugas yang tidak ringan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun penilaian program pendidikan. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk dapat memberdayakan semua unsur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pada satuan yang dipimpinnya, salah satunya komite sekolah. Kepala sekolah hendaknya saling bekerja sama dengan Komite Sekolah dengan lebih banyak melibatkan komite sekolah dalam kegiatan yang berhubungan dengan penetapan kebijakan sekolah, sehingga beban kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat lebih ringan dan terarah.

3. Bagi komite sekolah

Pembentukan komite sekolah mempunyai dasar yang cukup kuat dalam peraturan penyelenggaraan pendidikan. Keberadaanya diharapkan tidak hanya sebagai kelengkapan organisasi yang disyaratkan oleh pemerintah saja, atau sebagai “stempel” kebijakan kepala sekolah, namun lebih dari itu. Komite sekolah diharapkan dapat memberikan masukan-masukannya baik berupa

gagasan, tenaga atau materinya untuk membantu upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dalam rangka pemberdayaan diri untuk meningkatkan mutu pendidikan akan lebih baik hendaknya komite sekolah lebih proaktif dalam menjalankan peran dan tugasnya, demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan bersama.

4. Bagi masyarakat

Masyarakat memiliki andil yang besar dalam keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Keterlibatan masyarakat yang diprakarsai oleh komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah hendaknya lebih ditingkatkan lagi, sehingga upaya sekolah dalam meningkat mutu pendidikan di sekolah dapat berjalan secara optimal.

5. Bagi peserta didik

Salah satu tujuan kerja sama antara pihak sekolah dan komite sekolah adalah menyediakan sarana dan prasaran pendidikan yang memadai bagi peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik hendaknya dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh peserta didik dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rasyid, Dj. 2005. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Serang : UPI Kampus Serang
- Arifin, Z. 2011. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awie, Amirunsyah. *Implementasi Kebijakan Peran Komite Sekolah SMKN 5 Samarinda. Pemerintahan Integratif*. Vol. 2 No. 4, 2014, 2145- 2146
- Abdillah , Aziz. 2017. *Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMAN 28 Kabupaten Tangerang*. Skripsi
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, terj. Ahmad Lintang Lazuardi dkk*. Yogyakarta: PustakaPelajar
- Depdikbud. 1990. *Kamus Besa Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Indikator Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Daryanto. 2015. *Mengelola Budaya dan Iklim Sekolah*. Gava Media: Yogyakarta.
- Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Pengembangan Budaya dan Iklim Pembelajaran di Sekolah* (materi diklat pembinaan kompetensi calon kepala sekolah/kepala sekolah). Jakarta.
- Direktorat Pendidikan Nasional. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku I. Konsep Dasar*. Jakarta : Direktorat SLP Dirjen Dikdasmen, 2002.
- Fauziah, Herisfina. 2018. *Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 03*. Cisauk: Tesis
- Handoko, T. Hani. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, M. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hadiyanto. 2004. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasanah, Nur. 2016. *Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Wedarijaksa*. Tesis
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Irawan,Ade. 2004. *Mendagangkan Sekolah*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch
- Kompri. 2014. *Manajemen Sekolah Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta
- Manab,A. 2015. *Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta:Kalimedia
- Muhaimin, dkk. 2010. *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kencana
- Mulyasa, E. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E. 2013. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: BumiAksara
- Mulyasa, E. 2011. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurkolis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah. (2003). Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo
- Nuzula, Weny Firdausin. 2016. *Peran Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Studi Multi Kasus Di Mts Ma'arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunt Tulungagung)*. Tesis.
- Pantjastuti, S.R..2008. *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*.Yogyakarta: Hikayat Publishing
- Prasetia, I., Akrim, Sulasmi, E. *Model Sekolah Efektif Berbasis Kompetensi*.JURNAL Tarbiyah, 27 (1) (2020). 12-32
- Prasetia, I., Milfayetty, S., Dewi., R. *The Effect of Transformational Leardership and Academic Optimism Culture on Teacher Empowerment and Motivation Along Its Impact on The Effectiveness of Medan State Junior High School*. JLRES - International Journal on Language, Research and Education Studies. ISSN: 2580-6777 Vol. 4, No. 2, 2020. 276 -290
- Pratiwi, S.N. *Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah*. Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1 Maret2016
- Robbins, Stephen P. dan Mary Coulter. 2010. *Manajemen: Edisi kesepuluh*. diterjemahkan Bob Sabran dan Devri Barnadi Putra. Jakarta: Erlangga.
- Rufaidah, Siti. 2011. *Implementasi Peranan Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Standar Nasional Kecamatan Lumajang*. Tesis.
- Sagala, Syaiful. 2009. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*.Bandung: Alfabeta
- Siagian, S.P. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulasmi, E. Akrim, & Gunawan. 2018. *Konsep Pendidikan Humanis Dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia*.Kumpulan Buku Dosen.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Leni Rosnani lahir di Bah Jambi pada tanggal 12 Pebruari 1976, Putri ke enam dari Bapak H. Nganim Abdurrohlim dan Ibu Rubinem. Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 091566 Kabupaten Simalungun dan tamat pada tahun 1988. Sekolah Menengah Pertama di MTs Musthafawiyah Purba Baru, Kabupaten Mandailing Natal dan tamat pada tahun 1991. Sekolah Menengah Atas di MAN Pematangsiantar dan tamat pada tahun 1994.

Tahun 2007 melanjutkan pendidikan di Universitas Simalungun pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Jurusan Bahasa Indonesia. Pada tahun 2011 Penulis memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.

Tahun 2008 memulai karir sebagai guru di Perguruan Tamansiswa Bah Jambi. Dan tahun 2018 pindah mengajar di Perguruan Tamansiswa Pematangsiantar.

melanjutkan pendidikan di STKIP Teladan Medan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Dunia Usaha dan tahun 2008 memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.

Sejak tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan pada tanggal 01 September 2021 penulis mempertahankan Tesis dengan judul “*Analisis Peran dan Keterlibatan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar.*”.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Peran komite sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*)

1. Bagaimana keterlibatan komite sekolah sebagai badan pertimbangan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar?
2. Apakah komite sekolah selalu dilibatkan dalam hal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu sekolah?
3. Apa saja contoh bentuk keterlibatan komite sekolah dalam upaya ikut serta meningkatkan mutu pendidikan di sekolah?
4. Bagaimana mekanisme pembentukan komite sekolah di SMA Tamansiswa Pematangsiantar?
5. Kapan dan bagaimana komite sekolah dapat menyampaikan ide-idenya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah?

B. Peran komite sebagai badan pendukung (*supporting agency*)

1. Bagaimana keterlibatan komite sekolah sebagai badan pendukung dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar?
2. Apa saja bentuk dukungan yang diberikan oleh komite sekolah kepada pihak sekolah?

C. Peran komite sebagai badan pengontrol (*controlling agency*)

1. Bagaimana keterlibatan komite sekolah sebagai badan pengontrol dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar?

2. Apa saja bentuk kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah?
3. Apa saja objek yang dikontrol/diawasi oleh komite sekolah?

D. Peran komite sebagai badan penghubung (*mediator agency*)

1. Bagaimana keterlibatan komite sekolah sebagai mediator dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA Tamansiswa Pematangsiantar?
2. Apa saja yang dilakukan oleh komite sekolah dalam perannya sebagai mediator?
3. Bagaimana komite sekolah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah maupun pihak sekolah?
4. Seberapa penting komunikasi yang dilakukan antar komite sekolah, pihak sekolah dan masyarakat?